

KATA PENGANTAR

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Renstra Kementerian PPN/Bappenas) 2010-2014. Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2012 yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, telah menghasilkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang berkualitas serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Rancangan Dokumen RKP tahun 2013 serta penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dokumen RKP 2013 menjadi arah kebijakan nasional tahun 2013 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas (LAKIP) Tahun 2012.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Jakarta, Maret 2013

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

ARMIDA S. ALISJAHBANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	6
E. SUMBER PENDANAAN.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 – 2014.....	10
B. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN KINERJA.....	16
B. ANALISA DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA.....	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	56
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS	8
TABEL 2.	PAGU ANGGARAN TAHUN 2012 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	9
TABEL 3.	MISI TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	11
TABEL 4.	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2012 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	11
TABEL 5.	STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	13
TABEL 6.	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.....	15
TABEL 7.	HASIL PENGUKURAN KINERJA	17
TABEL 8.	KESESUAIAN ANTARA MUATAN RANCANGAN RKP 2013 DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RPJMN 2010-2014.....	20
TABEL 9.	PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RKP TAHUN 2012 DAN RKP 2013 DALAM RPJMN 2010-2014	21
TABEL 10.	KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RENJA K/L 2013 DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2013.....	23
TABEL 11.	PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RENJA K/L DENGAN RKP TAHUN 2012 DAN 2013.....	25
TABEL 12.	KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RKA-K/L 2013 DENGAN TARGET/ SASARAN DALAM RKP 2013	26
TABEL 13.	INDIKATOR KEGIATAN YANG TERPETAKAN LANGSUNG (<i>CONTOH: PRIORITAS ENERGI</i>)	28
TABEL 14.	INDIKATOR KEGIATAN YANG TERPETAKAN TIDAK LANGSUNG DAN TIDAK TERPETAKAN	29
TABEL 15.	REKAPITULASI PERBANDINGAN HASIL PEMETAAN KETERKAITAN KEGIATAN PRIORITAS RKP-RKAKL 2012 DAN RKP-RKAKL 2013.....	31
TABEL 16.	HASIL EVALUASI TERHADAP INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL (<i>CONTOH: PRIORITAS NASIONAL ENERGI</i>)	33
TABEL 17.	JUMLAH INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL YANG DIEVALUASI.....	33
TABEL 18.	PEROLEHAN WARNA INDIKATOR.....	34
TABEL 19.	TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2013.....	36
TABEL 20.	PERBANDINGAN JUMLAH PENUGASAN OLEH PEMERINTAH/PRESIDEN TAHUN 2011 DAN 2012.....	44
TABEL 21.	KINERJA PEMBINAAN SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013	51

TABEL 22. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIKLAT SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH	52
TABEL 23. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2012	57
TABEL 24. KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	58
TABEL 25. MATRIK PERMASALAHAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012	59

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.	STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	3
----------	---	---

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	7
GAMBAR 2. PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RKP 2012 DAN RKP 2013 DALAM RPJMN 2010-2014.....	22
GAMBAR 3. DIAGRAM PROSENTASE KEGIATAN TERHADAP SELURUH JUMLAH KEGIATAN DALAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2013)	24
GAMBAR 4. GRAFIK JUMLAH IKK PADA KEGIATAN PRIORITAS RKP 2013 YANG DAPAT DIPETAKAN DAN YANG TIDAK DAPAT DIPETAKAN.....	30
GAMBAR 5. PENILAIAN RB PADA KOMPONEN PENGUNGKIT	46
GAMBAR 6. PENGHARGAAN PENGELOLAAN BMN	49
GAMBAR 7. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN	54
GAMBAR 8. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2010, 2011 DAN 2012.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

LAMPIRAN 2: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2012 adalah: 1) terwujudnya rencana pembangunan nasional (RKP 2013) yang berkualitas; 2) terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas; 3) tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 3 (tiga). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2012 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan **telah menghasilkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang berkualitas**. Rancangan dokumen RKP 2013 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2013 yang dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) termasuk Pra Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas), baik Pra Musrenbangnas maupun Pasca Musrenbangnas serta pertemuan lainnya di tingkat teknis baik secara bilateral maupun trilateral. Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2013 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Rancangan dokumen RKP 2013 yang dihasilkan tersebut memiliki Tema "*Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat*" dengan unsur-unsur tema RKP 2013 adalah: 1) Daya saing; 2) Daya tahan ekonomi (*resilience*) perluasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan 3) Stabilitas sosial dan politik, dengan didukung prioritas pembangunan nasional sebanyak 14 prioritas nasional.

Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya, baik yang diberikan Pemerintah/Presiden dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan nasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai hasil yang sangat memuaskan khususnya di bidang pengelolaan keuangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eskternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2012 berdasarkan sasaran strategis dari 3 (tiga) tujuan yang telah ditetapkan di atas terlihat pada tabel berikut.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2013 dengan Renja dan RKA K/L 2013)	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014	100%	100%	100
		2. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013	100%	100%	100
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2013	100%	80,30%	80,30
		4. % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%	87,77%	87,77
		5. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2013	Cukup Baik	Baik	>100
2.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	80%	80%	100
3.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM	90%	88,3%	98,11
		2. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100	91,15	91,15
		3. % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%	94,60%	94,60
		4. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		5. Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik	Baik	100

Sebagaimana tabel di atas, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012, walaupun dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Belum optimalnya pencapaian target tersebut disebabkan adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat koordinasi, namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai berakhirnya masa dokumen Renstra 2010-2014 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
- 3) Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan value "*Better Performance*" yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik di tingkat lembaga (Menteri), unit organisasi (Eselon 1) dan satuan kerja (Eselon 2). Tahun 2012 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014.

Pada tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2013 melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012.

Pertanggungjawaban kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 1 dan 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri sebagai anggota Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian

PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi, sebagai berikut:

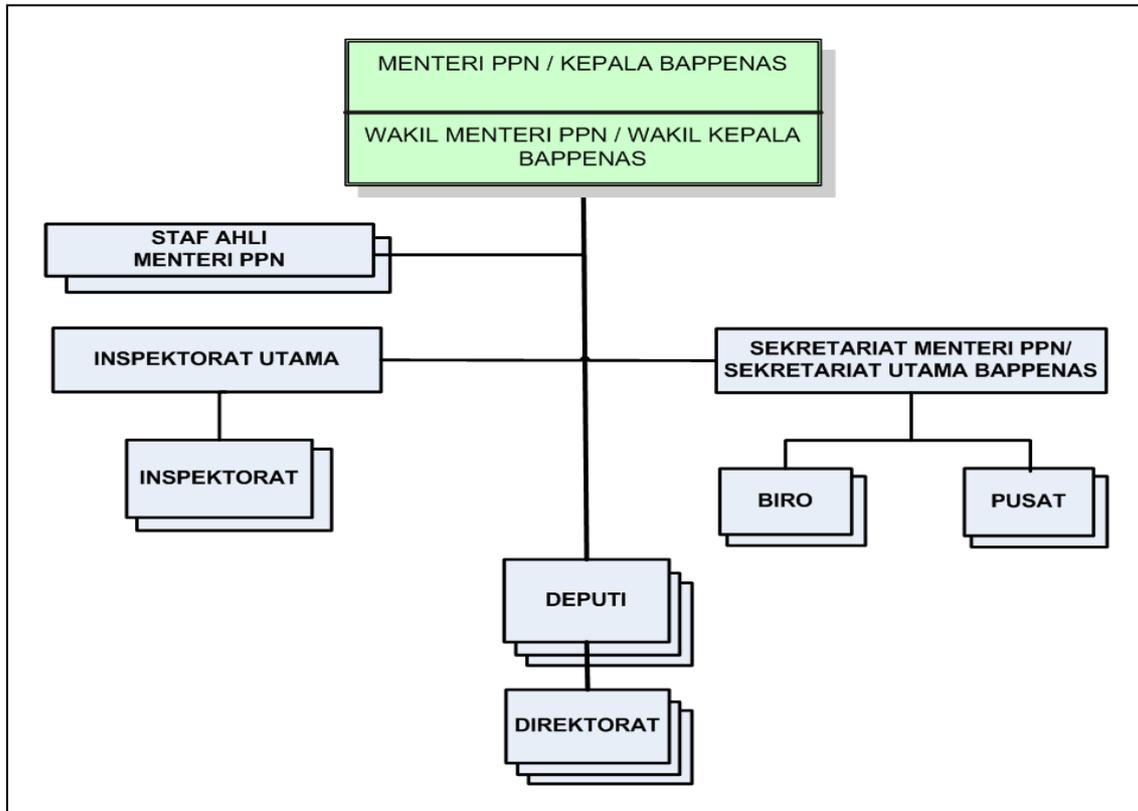
- 1) penyusunan rencana pembangunan nasional;
- 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam rangka koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, juga melaksanakan antara lain: (1) percepatan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; (2) penyusunan RUU, revisi Perpres dan Rperpres terkait pengadaan barang dan jasa, (3) pembangunan infrastruktur (Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional), dan (4) penyusunan kajian, kertas kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

BAGAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 17 unit kerja eselon I, 50 unit kerja eselon II, 162 unit kerja eselon III dan 55 unit kerja eselon IV. Sejak tahun 2004, Unit kerja eselon IV di Kedeputan telah ditiadakan dan diganti dengan jabatan fungsional perencana (JFP). Unit kerja eselon IV hanya ada di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputan, dan Inspektorat. Pertimbangan penghapusan jabatan eselon IV di Kedeputan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang perencanaan baik perencanaan makro, sektoral, dan regional. Diharapkan dengan penghapusan jabatan eselon IV dan pengembangan JFP akan mendorong peningkatan kinerja para pegawai di bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya pegawai yang menjabat fungsional perencana.

Unit kerja eselon I meliputi: 1 (satu) unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, 9 (sembilan) unit kerja Kedeputan, 1 (satu) unit kerja Inspektorat Utama, dan 5 (lima) unit kerja Staf Ahli Kementerian PPN.

Unit kerja eselon II meliputi 5 (lima) Biro, 2 (dua) Pusat, 41 Direktorat, dan 2 (dua) Inspektorat. Kemudian, unit kerja eselon III terdiri dari 17 bagian, 138 sub direktorat, serta 7 bidang, dan unit kerja eselon IV terdapat sebanyak 55 unit sub bagian.

Secara singkat uraian tugas dan fungsi unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas

Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

2. Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan, yang meliputi bidang kesehatan, gizi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

3. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yang meliputi bidang politik dan komunikasi, aparatur negara, hukum dan hak azazi manusia, analisa peraturan perundang-undangan, serta pertahanan dan keamanan.

4. Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah, yang meliputi bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kedeputian Bidang Ekonomi

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang meliputi bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, iptek, dan BUMN.

6. Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang meliputi bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup.

7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana, yang meliputi bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.

8. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan otonomi daerah, yang meliputi bidang pengembangan wilayah, kawasan khusus dan daerah tertinggal, otonomi daerah, perkotaan dan pedesaan, tata ruang dan pertanahan.

9. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan, yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, serta kerjasama pembangunan internasional.

10. Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja pembangunan

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan nasional, yang meliputi bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah, evaluasi kinerja pembangunan sektoral, serta sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pembangunan.

11. Inspektorat Utama

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan, pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

12. Sekretariat Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi koordinasi kegiatan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

13. Staf Ahli Menteri PPN

Memberikan telaahan mengenai masalah di bidangnya masing-masing (sumber daya alam, lingkungan hidup, dan perubahan iklim; hubungan kelembagaan; sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan; ekonomi dan pembiayaan; tata ruang dan kemaritiman), serta membantu Menteri dalam merumuskan kebijaksanaan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya masing-masing.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

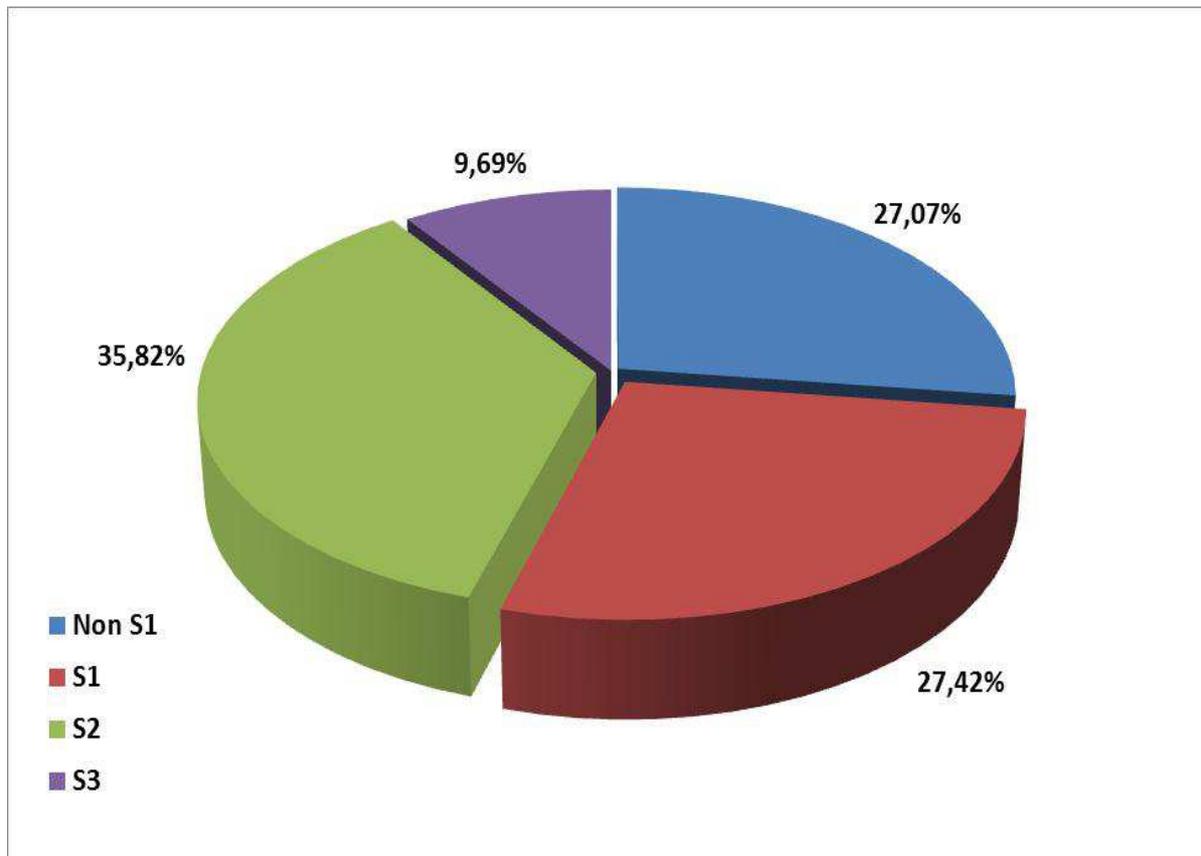
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2012, kekuatan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas adalah sebanyak 846 orang, terdiri atas 784 pegawai organik, 12 pegawai perbantuan, dan 50 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu, 82 orang (atau 9,69%) di antaranya berpendidikan doktor; 303 orang (35,82%) master, 232 orang (27,42%) sarjana lainnya berpendidikan Sarjana dan 229 orang (27,07%) Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 1 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut, 253 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 593 orang sebagai fungsional perencana dan staf.

Disamping itu, Bappenas adalah satu dari sedikit lembaga di tingkat pusat yang pegawainya memiliki latar belakang keilmuan paling bervariasi. Data pegawai Bappenas yang direkrut dalam rekrutmen terakhir (2009-2010) menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengangkat 69 staf perencana baru yang berasal dari 31 disiplin keilmuan yang berbeda. Ini sejalan dengan *core business* Bappenas yang memang bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di hampir semua bidang/sector. Latar belakang keilmuan yang memiliki persentase terbesar adalah teknik (31,88%), kemudian diikuti dengan ekonomi (28,99%), dan hukum (8,70%). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya meliputi: Administrasi Negara; Akuntansi; Antropologi; Geografi; Geologi; Hubungan Internasional; Ilmu Komunikasi; Ilmu Politik; Komputer; Perikanan/Perikanan Laut; Perpustakaan; Pertahanan; Sastra Inggris; Sosial Ekonomi Pertanian; Sosiologi; dan Statistik, memiliki persentase 30,43%.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural dan fungsional perencana serta arsiparis, diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menjangkau kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidangnya. Selain itu, juga dilaksanakan pelatihan bagi para pimpinan yang dimulai dari Eselon IV melalui diklat

Leadership Development Program, diklat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan kompetensi yang dijalankan secara bertahap bagi para pegawai yang telah menduduki minimal jabatan Eselon IV.

GAMBAR 1.
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	1	-	-	-	1
2	Eselon I	10	7	-	-	17
3	Eselon II	21	29	-	-	50
4	Eselon III	18	113	13	-	144
5	Eselon IV	-	21	18	2	41
6	Widyaiswara Madya	1	1	-	-	2
7	Fungsional Perencana Utama	3	5	-	-	8
8	Fungsional Perencana Madya	4	21	3	-	28
9	Fungsional Perencana Muda	1	26	8	-	35
10	Fungsional Perencana Pertama	-	23	99	-	122
11	Auditor Ahli Madya	-	2	-	-	2
12	Auditor Ahli Muda	-	-	4	-	4
13	Auditor Ahli Pertama	-	2	4	-	6
14	Auditor Pelaksana	-	-	-	1	1
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	0
16	Arsiparis Ahli Muda	-	-	-	-	0
17	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
18	Arsiparis Penyelia	-	-	-	3	3
19	Staf Perencana	4	32	40	-	76
20	Tata Usaha	-	-	36	110	146
21	Teknisi	-	-	1	6	7
22	Satpam / Security	-	-	-	13	13
23	Caraka	-	-	-	9	9
24	Pengemudi / Petugas Parkir	-	-	-	36	36
25	Pramubakti / Petugas Cafeteria	-	-	-	44	44
26	Dpk. Instansi Lain	19	21	5	5	50
JUMLAH TOTAL		82	303	232	229	846

E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2012, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 741,671 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 446,251 miliar (termasuk gaji PNS) dan anggaran PHLN sebesar Rp. 295,420 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 4 (empat) program pembangunan sebagaimana dalam Tabel 2.

TABEL 2.
PAGU ANGGARAN TAHUN 2012
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(dalam rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		
		RM	PHLN	TOTAL
I	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	119.773.502.000	113.243.195.000	233.016.697.000
		51,40%	48,60%	100%
II	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	264.278.298.200	182.176.826.800	446.455.125.000
		59,19%	40,81%	100%
III	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	58.500.000.000	-	58.500.000.000
		100%		100%
IV	Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3.700.000.000	-	3.700.000.000
		100%		100%
JUMLAH		446.251.800.200	295.420.021.800	741.671.822.000
		60,17%	39,83%	100%

Anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan Kementerian PPN/ Bappenas di bidang perencanaan termasuk evaluasi kinerja pembangunan. Selain itu, dari anggaran tersebut dipakai untuk melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: (1) percepatan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; (2) penyusunan RUU, revisi Perpres dan Rperpres terkait pengadaan barang dan jasa, (3) pembangunan infrastruktur (Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional), dan (4) penyusunan kajian, kertas kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2010-2014. Visi tersebut adalah:

“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

TABEL 3.
MISI TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	MISI
1	Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3	Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2012, sebagai berikut:

TABEL 4.
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2012
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014
% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013			
% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2013			
% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana			
Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2013			
2	Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas
3	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas			
fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah			
Opini dari BPK atas Laporan Keuangan			
Standar penilaian <i>good governance</i>			

4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2010 – 2014 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan berdasarkan arah kebijakan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2010-2104 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Penjelasan masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 3 (tiga) program, yaitu :

- 1) Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 2) Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupu tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Adapun penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan, masi sebagaimana tercermin dalam Tabel 5 di bawah ini.

TABEL 5.
STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, antara pusat dan daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional 3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional 4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional 	<p>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggaran, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional 3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan 4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional
<ol style="list-style-type: none"> 6. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai 7. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai 8. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel 9. Melanjutkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Kementerian PPN/Bappenas 10. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung kinerja lembaga dan pegawai 	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan daerah 2. Penyempurnaan ketatalaksanaan 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. 4. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (<i>brand image building</i>) 5. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan 6. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya 7. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah
	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya
	<p>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Kementerian PPN/Bappenas. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014. Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja disetiap unit kerja eselon I dan eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 3 (tiga). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014. Adapun penetapan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 sebagaimana terdapat pada Tabel 6 di bawah ini.

**TABEL 6.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	233.016.697.000
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013	100%		
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2013	100%		
	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%		
	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2013	cukup baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas lainnya	80%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/ Bappenas	446.455.125.000
	% fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%		
	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	58.500.000.000
	Opini dari BPK atas laporan Keuangan	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/ Bappenas	3.700.000.000
	Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II. Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2012, adalah:

- 1) Terwujudnya rencana pembangunan nasional yang berkualitas.
- 2) Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas
- 3) Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan dan sasaran tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rancangan rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun tahunan. Dari ketiga tujuan tersebut terdapat satu tambahan tujuan dan satu tambahan indikator pada tujuan dan sasaran pertama yang selanjutnya akan menyempurnakan penetapan tujuan, dan indikator kinerja utama dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014. Pertimbangan penambahan tujuan tersebut agar bisa memberikan gambaran keberhasilan kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara internal atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan penambahan satu indikator pada tujuan dan sasaran pertama adalah untuk mengukur kinerja atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional sesuai target dalam RPJMN 2010-2014. Dari ketiga tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2012 adalah pada Tabel 7 di bawah ini.

**TABEL 7.
HASIL PENGUKURAN KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2013 dengan Renja dan RKA K/L 2013)	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014	100%	100%	100
		% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013	100%	100%	100
		% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2013	100%	80,30%	80,30
		% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%	87,77%	87,77
		Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2013	Cukup Baik	Baik	>100
2.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	80%	80%	100
3.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM	90%	88,3%	98,11
		% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100	91,15	91,15
		fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%	94,60%	94,60
		Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik	Baik	100

B. ANALISA DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA

1. Tujuan 1 : Terwujudnya Rencana Pembangunan Nasional Yang Berkualitas

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional, ***telah menghasilkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang berkualitas***, yang ditetapkan melalui Perpres No. 54/2012 pada tanggal 14 Mei 2012.

Rancangan dokumen RKP 2013 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2013 yang dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) termasuk Pra Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) baik Pra Musrenbangnas maupun Pasca Musrenbangnas serta rapat-rapat lainnya di tingkat teknis baik secara bilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga-K/L) maupun trilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L dan Kemenkeu). Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2013 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Rancangan dokumen RKP 2013 tersebut merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2010-2014 sebagai arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah. Selanjutnya Dokumen RKP 2013 tersebut menjadi acuan bagi penyusunan RAPBN 2013 serta penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang tersebut.

Rancangan dokumen RKP 2013 tersebut memuat Tema : *“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”* Secara umum unsur-unsur dalam tema RKP 2013 meliputi: 1) Daya saing; 2) Daya tahan ekonomi (*resilience*) perluasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; 3) Stabilitas sosial dan politik dengan didukung prioritas pembangunan nasional sebanyak 14 Prioritas Nasional. Total alokasi dana kegiatan prioritas (RKP 2013) sebesar Rp. 254,9 triliun dan total alokasi dana kegiatan prioritas dalam (RKA-KL 2013) sebesar Rp. 409,6 triliun berdasarkan pagu anggaran dalam APBN 2013.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas dokumen RKP 2013 telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga diharapkan

peran Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama adalah % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2010-2014 telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- 2) Indikator kedua adalah % kesesuaian rancangan Renja K/L 2013 dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 2013 telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator ketiga adalah % kesesuaian rancangan RKA K/L 2013 dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 2013 telah tercapai sebesar 80,30% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- 4) Indikator keempat adalah % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana telah tercapai sebesar 87,77% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- 5) Indikator kelima adalah mengukur pendapat *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2013 melalui pelaksanaan survei dengan melibatkan *stakeholders* dengan sampel beberapa pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda). Tujuan dari pengukuran atas pendapat *stakeholders* terhadap proses RKP 2013 tersebut adalah untuk menilai tingkat kepuasan *stakeholders* atas proses penyusunan RKP 2013 sehingga diharapkan proses RKP tersebut dapat mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan target kinerja “cukup baik” ternyata hasil pengukuran kinerjanya menunjukkan “baik” atau lebih dari 100%.

Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut diatas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan pertama adalah sebagai berikut :

1) Tingkat Kesesuaian Antara Muatan Rancangan RKP 2013 dengan Target/Sasaran dalam RPJMN 2010-2014

Rancangan RKP 2013 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2010-2014. Kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2010-2014 diukur berdasarkan kegiatan dalam RKP 2013 dibandingkan dengan total kegiatan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing. Adapun persandingan jumlah kegiatan dalam RKP 2013 dengan total kegiatan dalam RPJMN 2010-2014 berdasarkan prioritas masing-masing sebagaimana Tabel 8 berikut.

TABEL 8.
KESESUAIAN ANTARA MUATAN RANCANGAN RKP 2013
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RPJMN 2010-2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMN 2010-2014	RKP 2013
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	43
2	Pendidikan	22	18
3	Kesehatan	16	28
4	Penanggulangan Kemiskinan	37	57
5	Ketahanan Pangan	80	72
6	Infrastruktur	44	36
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	36	33
8	Energi	23	26
9	Lingkungan Hidup	50	51
10	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	45	62
11	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	26	14
12	Bidang Perekonomian	32	60
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	23	73
14	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	51	35
JUMLAH		535	608

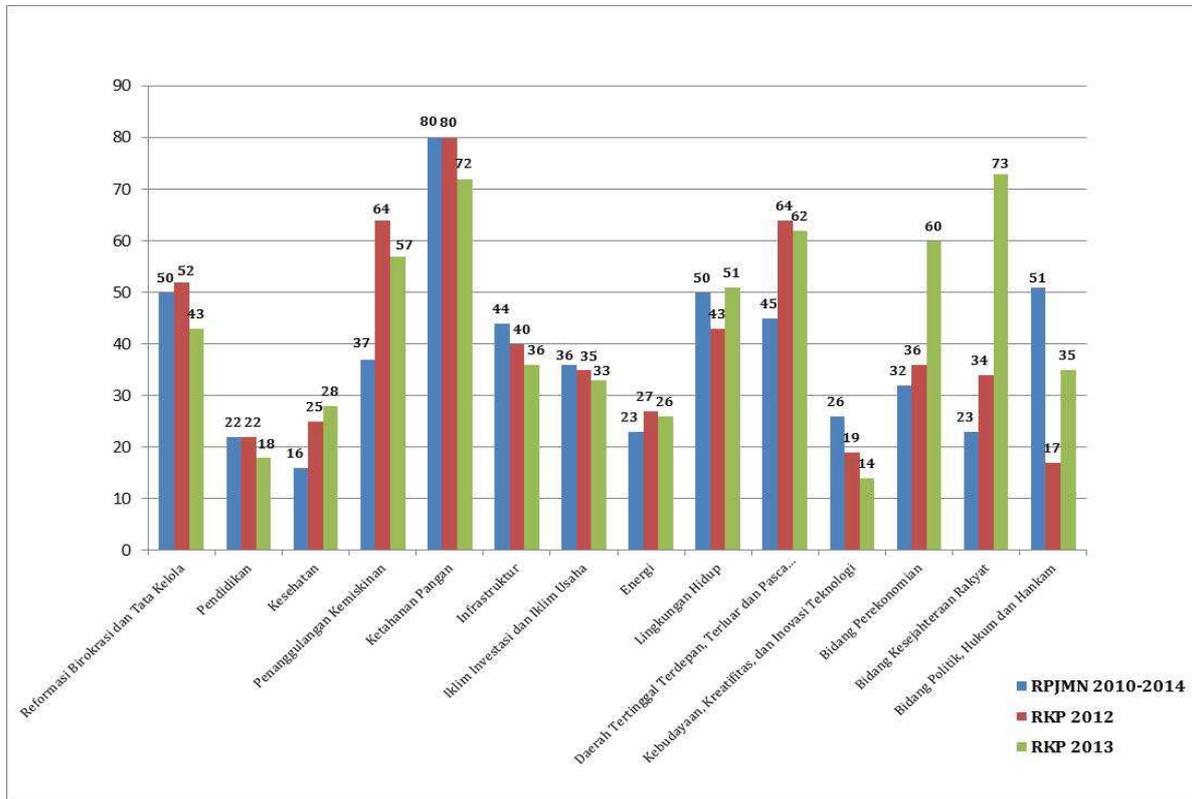
Tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang ada pada RKP 2013 melebihi total kegiatan yang ada pada RPJMN 2010-2014 (mengalami penambahan jumlah kegiatan pada RKP 2013). Penambahan ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka pendek. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKP 2013 diharapkan dapat sesuai dengan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014 sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam RPJMN 2010-2014. Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa dalam melakukan reuiu atas kesesuaian muatan rancangan RKP 2013 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2010-2014 juga dilakukan *assessment* secara bersamaan atas target/sasaran RPJMN 2010-2014 yang harus dijabarkan dalam sasaran RKP tiap tahunnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2013 telah memiliki integrasi dan sinergis secara konsisten. Dengan demikian, muatan rancangan RKP 2013 harus turut mendukung pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014.

Perbandingan kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam RKP 2013 terhadap total kegiatan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014 yang telah dijelaskan di atas dengan jumlah kegiatan dalam RKP 2012 terhadap RPJMN 2010-2014 terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 2 di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada RKP 2012 juga mengalami perbedaan jumlah kegiatan dengan RKP tahun 2013 dibandingkan terhadap total kegiatan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014. Ini artinya bahwa telah terjadi peningkatan kegiatan atas RKP tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali kegiatan dalam RKP 2013. Peningkatan tersebut merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka pendek. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKP 2012 dan RKP 2013 diharapkan dapat sesuai dengan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014 sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam RPJMN 2010-2014.

TABEL 9.
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RKP TAHUN 2012 DAN RKP 2013
DALAM RPJMN 2010-2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN		
		RPJMN 2010-2014	RKP 2012	RKP 2013
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	52	43
2	Pendidikan	22	22	18
3	Kesehatan	16	25	28
4	Penanggulangan Kemiskinan	37	64	57
5	Ketahanan Pangan	80	80	72
6	Infrastruktur	44	40	36
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	36	35	33
8	Energi	23	27	26
9	Lingkungan Hidup	50	43	51
10	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	45	64	62
11	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	26	19	14
12	Bidang Perekonomian	32	36	60
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	23	34	73
14	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	51	17	35
JUMLAH		535	558	608

GAMBAR 2.
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RKP 2012 DAN RKP 2013
DALAM RPJMN 2010-2014



2) Kesesuaian Rancangan Renja K/L 2013 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2013

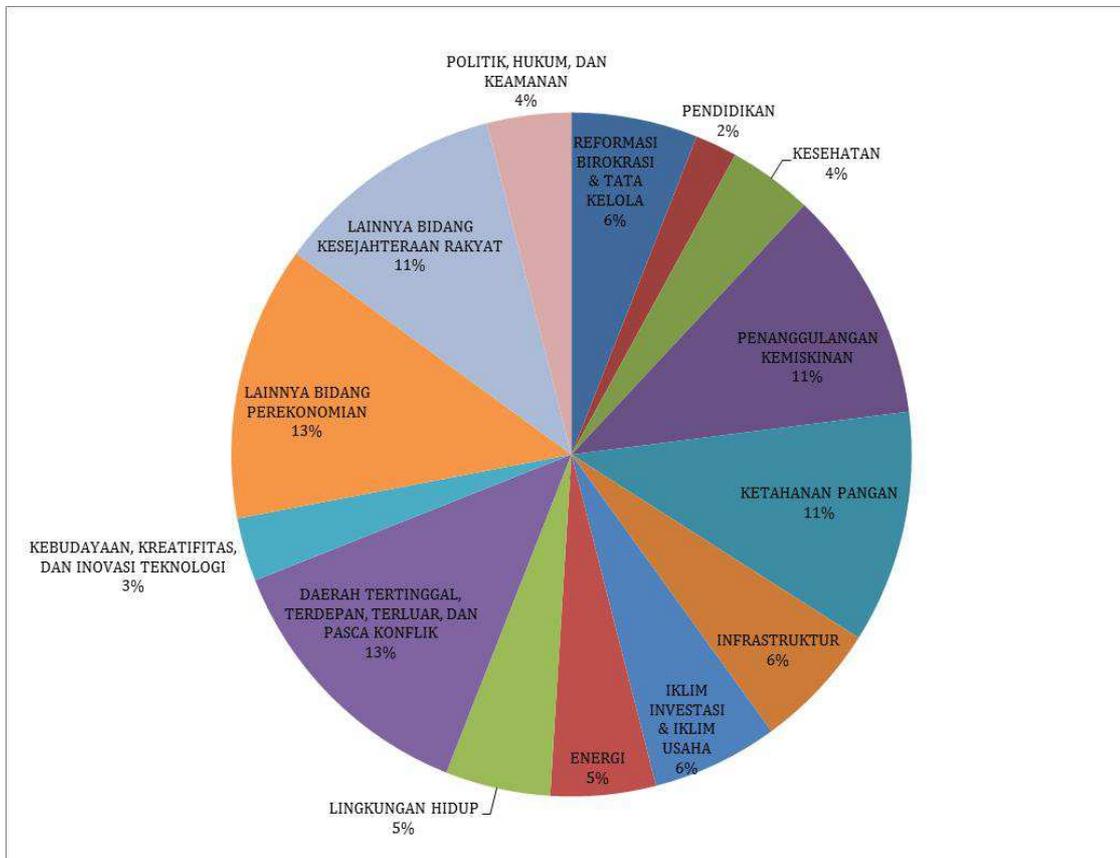
Renja K/L 2013 disusun berdasarkan pedoman pada RKP 2013. Pengukuran kesesuaian antara rancangan Renja K/L 2013 dengan target/sasaran dalam RKP 2013 berdasarkan atas kegiatan prioritas Renja K/L 2013 dibandingkan dengan total kegiatan prioritas dalam RKP 2013 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing. Adapun jumlah kegiatan prioritas dalam Renja K/L 2013 dan total kegiatan prioritas dalam RKP 2013 berdasarkan prioritas nasional masing-masing sebagaimana Tabel 10.

TABEL 10.
KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RENJA K/L 2013
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2013

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN	
		RKP 2013	Renja K/L
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	42	42
2.	Pendidikan	11	11
3.	Kesehatan	19	19
4.	Penanggulangan Kemiskinan	46	46
5.	Ketahanan Pangan	69	69
6.	Infrastruktur	27	27
7.	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	31	31
8.	Energi	25	25
9.	Lingkungan Hidup	51	51
10.	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	57	57
11.	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	14	14
12.	Bidang Perekonomian	61	61
13.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	65	65
14.	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	33	33
JUMLAH		551	551

Sebagaimana pada Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa kegiatan prioritas yang ada pada Renja K/L 2013 sudah sesuai dengan total kegiatan prioritas yang ada pada RKP 2013, sehingga diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga tahun 2013 dapat mewujudkan pencapaian target/sasaran pembangunan nasional dalam jangka pendek sesuai dengan prioritas masing-masing dalam RKP 2013. Dengan demikian, revidi dan analisa kesesuaiannya juga dengan mempersandingkan antara sasaran dalam Renja K/L dengan sasaran dalam RKP 2013. Adapun pembagian prosentase antara kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga terhadap total kegiatan dalam Prioritas Nasional dalam RKP 2013 sebagaimana dalam Gambar 3 berikut.

GAMBAR 3.
DIAGRAM PROSENTASE KEGIATAN RENJA K/L
TERHADAP SELURUH JUMLAH KEGIATAN
DALAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2013)



Sesuai dengan Gambar 2 di atas, secara prosentase kegiatan Renja K/L terhadap kegiatan prioritas RKP 2013 diurutkan pertama adalah prioritas 10 (Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik) dan Prioritas 12 (Bidang Perekonomian) sebesar 13%; urutan kedua adalah prioritas 4 (Penanggulangan Kemiskinan) dan prioritas 5 (Ketahanan Pangan) sebesar 11%; urutan ketiga adalah prioritas 1 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola), prioritas 6 (Infrastruktur) dan prioritas 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) sebesar 6%; urutan keempat adalah prioritas 8 (Energi) dan prioritas 9 (Lingkungan Hidup) sebesar 5%; urutan kelima adalah prioritas 3 (Kesehatan) dan prioritas 14 (Bidang Politik, Hukum dan Hankam) sebesar 4%; urutan keenam adalah prioritas 3 (Kesehatan) sebesar 3% dan urutan ketujuh atau terakhir adalah prioritas 2 (pendidikan) sebesar 2%. Proporsi dari prosentase kegiatan K/L 2013 dengan kegiatan prioritas RKP 2013 menunjukkan bahwa pembangunan nasional sesuai dengan tema RKP 2013 adalah untuk Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat khususnya di Daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik sehingga pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia dapat terus meningkat.

Sedangkan untuk mengetahui perbandingan jumlah kegiatan dalam Renja KL dengan RKP tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

TABEL 11.
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RENJA K/L DENGAN
RKP TAHUN 2012 DAN 2013

NO.	PRIORITAS DALAM RKP 2013	JUMLAH KEGIATAN	
		(2012)	(2013)
1	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	52	43
2	Pendidikan	22	18
3	Kesehatan	25	28
4	Penanggulangan Kemiskinan	64	57
5	Ketahanan Pangan	80	72
6	Infrastruktur	40	36
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	35	33
8	Energi	27	26
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	43	51
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	64	62
11	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	19	14
12	Politik, Hukum dan Keamanan	36	35
13	Perekonomian	34	60
14	Kesejahteraan Rakyat	17	73
TOTAL PEMETAAN		558	608

Sebagaimana tabel di atas perbandingan antara kegiatan Renja K/L dengan kegiatan prioritas RKP 2012 dan RKP 2013 menunjukkan bahwa beberapa prioritas mengalami peningkatan jumlah kegiatan. Adapun jumlah kegiatan yang meningkat tajam adalah pada prioritas 14 (bidang kesejahteraan rakyat) yaitu dari jumlah 17 kegiatan pada RKP 2012 meningkat drastis sebanyak 73 kegiatan pada RKP 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan terus didorong melalui kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat.

3) Kesesuaian Rancangan RKA K/L 2013 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2013

RKA K/L 2013 merupakan penjabaran dari dokumen Renja K/L 2013 yang mengacu pada RKP 2013. Pengukuran kesesuaian antara muatan rancangan RKA K/L 2013 dengan target/sasaran dalam RKP 2013 berdasarkan atas output kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2013 dibandingkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) prioritas dalam RKP 2013 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing, sebagaimana terdapat pada Tabel 12 di bawah ini.

TABEL 12.
KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RKA-K/L 2013
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2013

NO	PRIORITAS DALAM RKP 2013	JUMLAH PROGRAM (2013)	JUMLAH KEGIATAN (2013)	JUMLAH INDIKATOR (2013)	TERPETAKAN (2013)				TIDAK TERPETAKAN (2013)	
					L	T L	JML	%	TTP	%
1	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	15	43	120	99	15	114	95,0	6	5,0
2	Pendidikan	7	18	63	47	13	60	95,2	3	4,8
3	Kesehatan	10	28	73	42	16	58	79,5	15	20,5
4	Penanggulangan Kemiskinan	29	57	137	92	13	105	76,6	32	23,4
5	Ketahanan Pangan	28	72	251	178	34	212	84,5	39	15,5
6	Infrastruktur	15	36	108	80	15	95	88,0	13	12,0
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	17	33	93	63	11	74	79,6	19	20,4
8	Energi	13	26	59	26	14	40	67,8	19	32,2
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	13	51	146	86	41	127	87,0	19	13,0
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	33	62	187	118	23	141	75,4	46	24,6
11	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	8	14	28	18	3	21	75,0	7	25,0
12	Politik, Hukum dan Keamanan	33	60	145	63	29	92	63,4	53	36,6
13	Perekonomian	28	73	170	88	44	132	77,6	38	22,4
14	Kesejahteraan Rakyat	10	35	71	46	11	57	80,3	14	19,7
TOTAL PEMETAAN		259	608	1.651	1.046	282	1.328	80,3	323	19,7

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa ouput kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2013 dengan indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP 2013 belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pencapaian target baru mencapai 80,3%, artinya ouput kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2013 dengan indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP 2013 belum sesuai seluruhnya (80,30%). Namun ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan hasil pemetaan atau reuiu berdasarkan kriteria pemetaan terhadap indikator kinerja yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: terpetakan (sesuai) dan tidak terpetakan (tidak sesuai).

(1) Kriteria terpetakan, dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- **Terpetakan Langsung**

Terpetakan Langsung, adalah kegiatan prioritas yang indikator kinerja kegiatannya terkait langsung atau sama persis dengan output dari kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKA-KL, baik terkait secara nomenklatur, substansi maupun target/volume kegiatan sebagaimana contoh pada Tabel 13.

- **Terpetakan Tidak Langsung**

Kegiatan Prioritas yang Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume kegiatannya terkait dengan *output* kegiatan yang ada di dokumen RKA-KL sebagaimana terdapat pada Tabel 14.

- (2) Kriteria tidak terpetakan, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas yang ada dalam RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA-KL, baik dari segi nomenklatur, substansi maupun target atau volume kegiatannya sebagaimana contoh pada Tabel 14.

Secara grafik jumlah indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP 2013 yang dapat dipetakan dan yang tidak dapat dipetakan dapat dilihat pada Gambar 3.

TABEL 13.
INDIKATOR KEGIATAN YANG TERPETAKAN LANGSUNG
(CONTOH: PRIORITAS ENERGI)

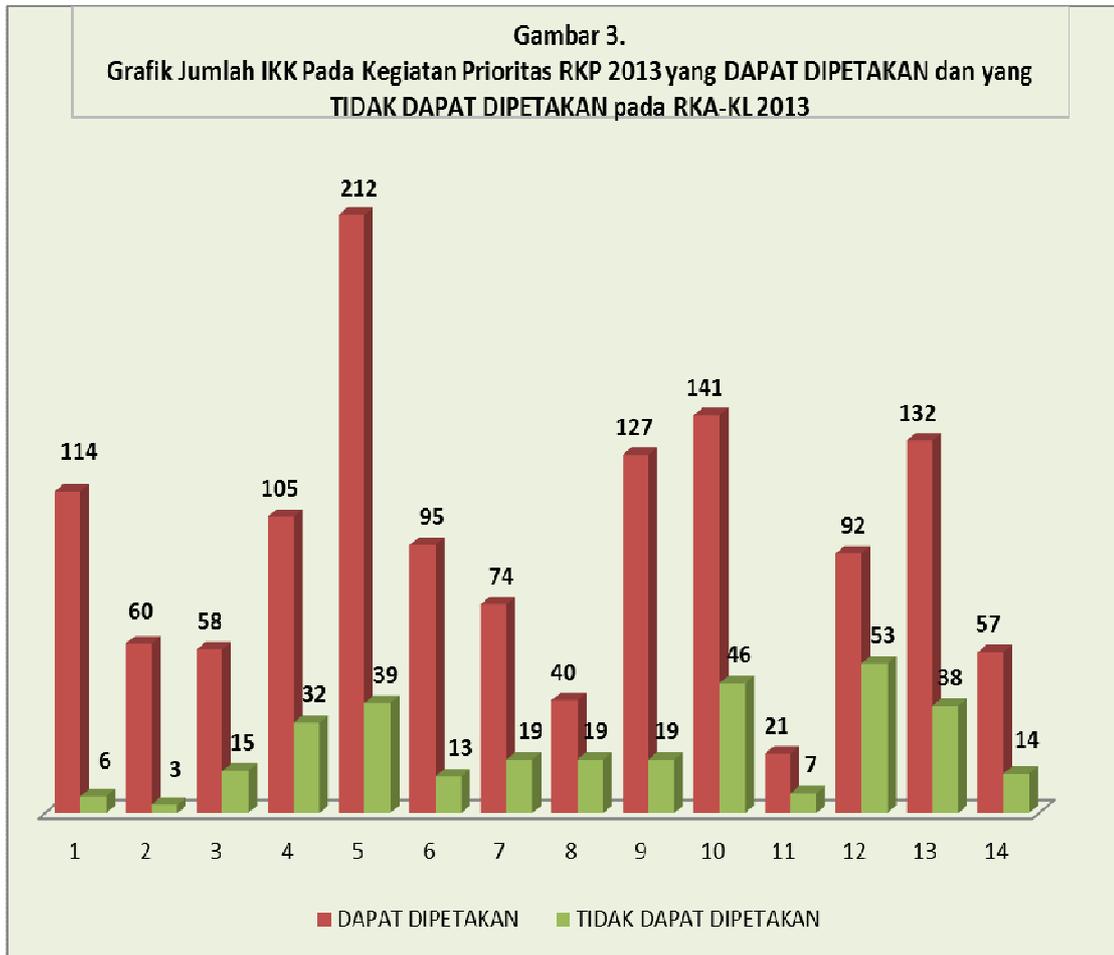
RKP (BUKU I)				RKA-KL			
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOL	ALOKASI
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (ESDM)			020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (ESDM)		
020.0 6	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan gas Bumi			020.0 6	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan gas Bumi		
1895	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas		147.000	1895	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas		182.891,9
	001 Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum di perkotaan	3 lokasi			001 Laporan pembinaan dan pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Usaha Minyak dan Gas Bumi		
					002 Laporan pembinaan dan pengawasan Kegiatan Usaha Penunjang Migas		
					003 Infrastruktur Gas alam untuk bahan bakar angkutan umum perkotaan	3	
					005 Laporan penyusunan pedoman dan pembinaan serta pengawasan keselamatan operasi hulu migas		
					006 Laporan penyusunan pedoman dan pembinaan serta pengawasan keselamatan operasi hilir migas		
					007 Laporan rancangan Standar Nasional Indonesia (RSI) dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) untuk kegiatan usaha migas		

TABEL 14.
INDIKATOR KEGIATAN YANG TERPETAKAN TIDAK LANGSUNG DAN TIDAK TERPETAKAN
(CONTOH: PRIORITAS BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR)

INDIKATOR KEGIATAN YANG TERPETAKAN TIDAK LANGSUNG (CONTOH: PRIORITAS BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)							CONTOH INDIKATOR KEGIATAN YANG TIDAK TERPETAKAN (CONTOH: PRIORITAS INFRASTRUKTUR)						
RKP (BUKU I)			ALOKASI	RKA-KL			ALOKASI						
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOL		ALOKASI					
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI			011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI								
011.08	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika			011.08	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika								
1310	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika		150.100,0	1310	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika		149,466,7						
	001 Penyelenggaraan rangkaian sidang/konferensi internasional terkait ketetuaan dan ketuanrumahan Indonesia di APEC pada tahun 2013	6 sidang/konferensi internasional		001 Laporan Kegiatan/Prakarsa/Rekomendasi/Koordinasi/Sidang/Seminar/Sosialisasi dalam berbagai bidang melalui kerjasama Intra kawasan Aspasaf									
				002 Kesepakatan / implementasi kesepakatan di berbagai bidang melalui kerjasama intra kawasan Aspasaf									
				003 Kesepakatan dalam rangkaian sidang/konferensi internasional terkait ketetuaan APEC Tahun 2013	6								

RKP 2013			ALOKASI	RKA-KL 2013			ALOKASI
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOL	
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
059.07	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika		389.800,0	059.07	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika		1.782.962,6
3060	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika		176.200,0	3060	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika		1.569.316,1
	001 Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72, 800 desa di Indonesia)	100%		001 Dokumen pengurusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga balai	31,824		
	001 Prosentase pembangunan internasional internet exchange (4 ibukota provinsi)	80%		994 Layanan Perkantoran	12		
	002 Prosentase kecamatan yang dilayani akses internet (5748 titik di kecamatan WPUT)	100%					
	002 Prosentase penyediaan Nusantara Internet Exchange	80%					
	003 Prosentase penyelenggaraan MPLIK (1.907)	100%					

GAMBAR 4.
GRAFIK JUMLAH IKK PADA KEGIATAN PRIORITAS RKP 2013 YANG DAPAT DIPETAKAN
DAN YANG TIDAK DAPAT DIPETAKAN



Dari gambar grafik tersebut di atas bahwa perbandingan antara indikator kinerja kegiatan yang dapat dipetakan dan yang tidak dapat dipetakan khususnya pada prioritas 10 dan prioritas 12 dari output kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2013 dengan indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP 2013 kecenderungannya bisa dinilai akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Namun kecenderungan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dalam meletakkan output kegiatan utama dengan kegiatan pendukung. Untuk itu, setiap tahun Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong Kementerian/Lembaga dapat menentukan kriteria penentuan output kegiatan utama dengan output kegiatan pendukung sehingga diharapkan untuk tahun berikutnya kegiatan yang tidak dapat dipetakan dapat berkurang. Dengan demikian pencapaian target kesesuaian antara output kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2013 dengan indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP 2013 semakin meningkat. Hal ini terlihat bahwa, ketidaksesuaian antara output kegiatan prioritas dalam RKA K/L dengan indikator kinerja kegiatan prioritas dalam RKP pada tahun 2013 semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu dari sebesar 29,5% menjadi sebesar 19,7%.

TABEL 15.
REKAPITULASI PERBANDINGAN HASIL PEMETAAN KETERKAITAN
KEGIATAN PRIORITAS RKP-RKAKL 2012 DAN RKP-RKAKL 2013

NO.	PRIORITAS DALAM RKP 2013	JUMLAH PROGRAM (2013)	JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH INDIKATOR		TERPETAKAN								TIDAK TERPETAKAN			
			(2012)	(2013)	(2012)	(2013)	(2012)				(2013)				(2012)		(2013)	
							L	T L	JML.	%	L	T L	JML.	%	TTP	%	TTP	%
1	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	15	52	43	144	120	55	32	87	60,4	99	15	114	95,0	57	39,6	6	5,0
2	Pendidikan	7	22	18	71	63	26	37	63	88,7	47	13	60	95,2	8	11,3	3	4,8
3	Kesehatan	10	25	28	66	73	18	17	35	53,0	42	16	58	79,5	31	47,0	15	20,5
4	Penanggulangan Kemiskinan	29	64	57	153	137	91	27	118	77,1	92	13	105	76,6	35	22,9	32	23,4
5	Ketahanan Pangan	28	80	72	322	251	227	22	249	77,3	178	34	212	84,5	73	22,7	39	15,5
6	Infrastruktur	15	40	36	169	108	51	51	102	60,4	80	15	95	88,0	67	39,6	13	12,0
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	17	35	33	117	93	72	16	88	75,2	63	11	74	79,6	29	24,8	19	20,4
8	Energi	13	27	26	80	59	41	16	57	71,3	26	14	40	67,8	23	28,8	19	32,2
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	13	43	51	134	146	84	22	106	79,1	86	41	127	87,0	28	20,9	19	13,0
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	33	64	62	219	187	121	12	133	60,7	118	23	141	75,4	86	39,3	46	24,6
11	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	8	19	14	41	28	24	2	26	63,4	18	3	21	75,0	15	36,6	7	25,0
12	Politik, Hukum dan Keamanan	33	34	60	84	145	45	13	58	69,0	63	29	92	63,4	26	31,0	53	36,6
13	Perekonomian	28	17	73	53	170	19	13	32	60,4	88	44	132	77,6	21	39,6	38	22,4
14	Kesejahteraan Rakyat	10	36	35	62	71	49	7	56	90,3	46	11	57	80,3	6	9,7	14	19,7
TOTAL PEMETAAN		259	558	608	1.715	1.651	923	287	1.210	70,5	1.046	282	1.328	80,3	505	29,5	323	19,7

Keterangan:

 = Tahun 2012

 = Tahun 2013

4) % Sasaran Prioritas Nasional Yang Telah Sesuai Dengan Rencana

Evaluasi atas pelaksanaan suatu rencana merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen pembangunan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi atas pencapaian kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan yang telah/sedang dilaksanakan dan memuat permasalahan, kendala yang dihadapi, serta opsi tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Untuk mengukur pencapaian indikator keempat tentang Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan pelaksanaan rencana pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 (*Mid-Term Review*) atas pencapaian keempat belas prioritas nasional. Adapun hasil dari pelaksanaan *mid-term review* tersebut adalah dari 14 (empat belas) Prioritas Nasional yang dievaluasi, baru 9 (sembilan) Prioritas Nasional yang diperkirakan mencapai target yang diharapkan. Sedangkan 5 (lima) Prioritas Nasional lainnya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target sampai dengan tahun 2014.

Adapun rumus untuk mengukur pencapaian kinerja atas indikator sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana adalah membandingkan antara total sasaran prioritas RPJMN yang tercapai (sesuai warna hijau dan kuning) dengan total sasaran prioritas di RPJMN (warna hijau, kuning dan merah) dikalikan 100%. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan pencapaian sasaran prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dapat terukur sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi paruh waktu ini dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian indikator penting yang merupakan indikator sasaran utama RPJMN 2010-2014, indikator substansi inti, atau indikator kegiatan prioritas. Dalam melakukan evaluasi tersebut, digunakan 3 warna notifikasi yaitu hijau (sudah tercapai/*on track/ on trend*), kuning (perlu kerja keras), dan merah (sangat sulit tercapai). Selanjutnya dalam Tabel 16 terlihat contoh tabel yang digunakan untuk melaporkan perolehan warna masing-masing indikator.

TABEL 16.
HASIL EVALUASI TERHADAP INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL
(CONTOH: PRIORITAS NASIONAL ENERGI)

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target (2014)	Perkembangan Pencapaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Produksi Minyak Bumi	Ribu Barrel/Hari	949	1.010 ^{*)}	945	902	877	
Kapasitas Pembangkit	Tambahan (MW)	31.959	3.000 MW/ Tahun	2.024	5.916	2.940	
	Terpasang (Kumulatif MW)			33.983	39.899	42.839	
Rasio Elektrifikasi	%	65,79	80	67,15	72,95	75,90	
Kapasitas PLTP	Terpasang (Kumulatif MW)	1.179	5.000	1.189	1.226	1.231	
Pembangunan Jaringan Gas Kota	Kota/ Sambungan Rumah (Kumulatif)	n.a ^{**)}	19/ 80.000	6/ 10.316	9/ 28.280	13/ 44.280	
Pembangunan SPBG	Unit (Kumulatif)	n.a ^{**)}	21	FEED ^{***)}	4	8	
Keterangan: *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta; **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) <i>Front End Engineering Design</i> .  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Dari 14 (empatbelas) Prioritas Nasional, terdapat 139 indikator dievaluasi seperti yang dirinci pada tabel di bawah ini:

TABEL 17.
JUMLAH INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL YANG DIEVALUASI

PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH INDIKATOR
Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	12
Prioritas Nasional 2: Pendidikan	8
Prioritas Nasional 3: Kesehatan	12
Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan	4
Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan	9
Prioritas Nasional 6: Infrastruktur	13
Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi Dan Iklim Usaha	9
Prioritas Nasional 8: Energi	6
Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana	11
Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pascakonflik	4
Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, Dan Inovasi Teknologi	7
Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum, Dan Keamanan	11
Prioritas Nasional 13: Perekonomian	17
Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat	16

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi terhadap 139 indikator tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 18 di bawah ini adalah menunjukkan bahwa **87,77%** atau 122 indikator dari keempat belas Prioritas Nasional telah sesuai dengan rencana, sedangkan 12,23% atau 17 indikator belum sesuai dengan rencana. Jumlah 122 indikator yang sesuai dengan merupakan jumlah indikator yang mendapat warna hijau (sudah tercapai) sebanyak 91 indikator, dan kuning (perlu kerja keras) sebanyak 31 indikator. Adapun sebanyak 17 indikator atau **12,23%** indikator yang belum sesuai rencana merupakan jumlah indikator yang mendapat warna merah (sangat sulit tercapai).

TABEL 18.
PEROLEHAN WARNA INDIKATOR

WARNA INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR	%
Hijau	91	65,47
Kuning	31	22,30
Merah	17	12,23
JUMLAH	139	100

Jumlah indikator yang mendapatkan warna merah tersebut terdapat pada Prioritas Nasional 3 yaitu Kesehatan, merupakan Prioritas Nasional yang paling banyak mendapat warna merah pada kedua belas indikatornya. Adapun Prioritas Nasional 2 (Pendidikan), Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan kemiskinan), Prioritas Nasional 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan bencana), Prioritas Nasional 11 (Kebudayaan, Kreativitas, dan Teknologi), dan Prioritas Nasional 14 (Kesejahteraan Rakyat) seluruh indikatornya mendapatkan warna hijau. Lebih lanjut mengenai perolehan warna masing-masing indikator pada setiap Prioritas Nasional dapat dilihat pada lampiran laporan *Mid Term Review*.

Hasil pengukuran kinerja atas pencapaian Sasaran Prioritas Nasional Yang Telah Sesuai Dengan Rencana dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Hasil ini hanya bisa dilihat pada hasil *Mid Term Review* yang dilaksanakan pada pertengahan pelaksanaan RJMN 2010-2014, yaitu sekitar 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Untuk melihat perbandingan setiap tahunnya tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak ada data pembandingan tahun sebelumnya.

5) **Pendapat Stakeholders Terhadap Proses Penyusunan RKP 2013**

Kualitas dokumen rencana pembangunan secara signifikan akan terkait langsung dengan proses penyusunan rencana tersebut. Proses penyusunan rencana merupakan pelaksanaan keseluruhan tahapan perencanaan secara sistematis dan adanya dukungan sumberdaya, melibatkan keseluruhan pemangku kepentingan untuk memilih alternatif tindakan sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan, sasaran/target pembangunan. Koordinasi dan sinkronisasi dalam

perencanaan pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa ketidakberhasilan atau bahkan kegagalan berbagai kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor kebijakan itu sendiri, namun juga disebabkan oleh perencanaan kebijakan itu sendiri yang tidak dikoordinasikan secara baik sehingga berakibat tidak atau kurang berhasilnya pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas proses penyusunan rencana secara aktual akan terkait langsung dengan optimalisasi peran Bappenas. Kualitas proses perencanaan akan memberikan gambaran prediktif bagaimana mutu dokumen rencana yang dihasilkan. Keterkaitan ini memberikan alasan logis perlunya mengidentifikasi bagaimana penilaian para pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Untuk mengukur kualitas proses terhadap penyusunan RKP 2013 diperlukan analisa persepsi *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2013, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi dan menguraikan persepsi para pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan RKP 2013 khususnya pada aspek jadwal pelaksanaannya (konsistensi implemementasi waktu).
- (2) Mengidentifikasi dan menguraikan tingkat optimalitas atau kualitas pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP 2013.
- (3) Merumuskan saran untuk memperbaiki atau meningkatkan penyelenggaraan penyusunan RKP berdasarkan masukan atau penialaian para pemangku kepentingan perencanaan.

Tahapan dan ruang lingkup atas analisa persepsi *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2013 dilaksanakan melalui tahapan :

- Penelusuran literatur dan dokumen hasil studi yang relevan.
- *Focus group discussion* (FGD) dengan seluruh tim kajian, narasumber, dan pelaku pembangunan.
- Pengembangan kerangka dan desain kajian.
- Pengembangan instrumen kajian dan evaluasi validitas reliabilitas instrumen yang dikembangkan.
- Pengambilan data primer, melalui metode survey dan FGD.
- Analisis data dan informasi, serta interpretasi hasil analisis.

Hasil yang diharapkan dari analisa persepsi *stakeholders* adalah:

- Teridentifikasinya tingkat konsistensi manajemen waktu implemementasi proses penyusunan RKP 2013.
- Teridentifikasi tingkat optimalitas atau kualitas pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP 2013.
- Memberikan gambaran secara jelas tingkat atau Kualifikasi mutu penyusunan RKP dan gagasan pengembangan mutu.

Berikut ini adalah persepsi responden yaitu *stakeholders* dalam penyusunan RKP 2013 mengenai implementasi jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perencanaan, dan penilaian terkait optimalitas dari tahapan setiap kegiatan perencanaan tersebut. Penilaian optimalitas implementasi yang dimaksudkan disini adalah penilaian khalayak berupa persepsi terhadap kualitas dari pelaksanaan kegiatan dan sejauhmana kondisi tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan setiap tahapan kegiatan perencanaan khususnya dalam penyusunan RKP 2013.

Secara keseluruhan tahapan dalam proses penyusunan RKP 2013 dinilai oleh responden rata-rata adalah baik, artinya telah berjalan sesuai harapan seluruh tahapan proses penyusunan RKP 2013. Lebih terinci tingkat optimalitas pelaksanaan masing-masing kegiatan dinilai oleh responden berbeda-beda, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 19 berikut.

TABEL 19.
TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2013

TAHAPAN KEGIATAN	TINGKAT IMPLEMENTASI KEGIATAN (%)	NOMOR URUT (TERTINGGI-TERENDAH)	NILAI
Pra Rakorbangpus	95,96	1	Sangat Baik
Rakorbangpus	54,17	6	Cukup Baik
Musrenbangprov	86,72	3	Baik
Pra Musrenbangnas	93,80	2	Sangat Baik
Musrenbangnas	77,55	5	Baik
Pasca Musrenbangnas	83,33	4	Baik

Berdasarkan analisis pada masing-masing kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa responden menilai implementasi paling optimal dari pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian penyusunan RKP 2013 adalah pada pelaksanaan Pra Rakorbangpus, selanjutnya adalah kegiatan Pra Musrenbangnas, serta Musrenbangprov. Kegiatan yang dinilai belum optimal oleh responden adalah kegiatan Rakorbangpus. Berikut ini akan diuraikan secara lebih detail tentang persepsi responden terhadap masing-masing tahapan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RKP 2013.

(a) Pra Rakorbangpus

Pra Rakorbangpus merupakan kegiatan awal untuk mempersiapkan penyusunan RKP, yang secara substantif punya esensi untuk menetapkan masukan isu strategis sebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat daerah. Menurut responden fase kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terdapat pada Tabel 9, bahwa responden menilai implementasi

kegiatan tersebut mencapai skor 95,96%. Ini berarti pelaksanaan Pra Rakorbangpus sudah berjalan sebagaimana diharapkan.

(b) Rakorbangpus

Secara umum Rakorbangpus adalah wahana untuk mendesiminasikan rancangan awal RKP 2013 dan SEB pagu indikatif 2013. Menurut responden kegiatan atau implementasi Rakorbangpus dinilai belum optimal dengan tingkat penilaian sebesar 54,17%. Peran Bappeda Provinsi dalam Rakorbangpus adalah menghadiri Rakorbangpus sebagai peninjau, dan menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan final isu strategis untuk provinsinya masing-masing pada forum temu konsultasi triwulanan II Kementerian PPN/Bappenas-Bappeda Provinsi. Sebagian responden memberikan masukan agar Rakorbangpus dapat lebih dioptimalkan, antara lain terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Alokasi waktu yang diperlukan untuk daerah perlu ditambah dan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menelaah berdasarkan dokumen yang dimiliki.
- Kemampuan SDM Bappenas dalam memfasilitasi dan efektifitas pola komunikasi yang perlu dikembangkan dalam memfasilitasi kegiatan Rakorbangpus khususnya dalam memfasilitasi daerah.
- Apresiasi dan akomodasi masukan peserta pada tahap kegiatan ini dan kejelasan terhadap tindaklanjutnya.

(c) Musrenbangprov

Pada prinsipnya media Musrenbangprov adalah menghasilkan UKPPD. Secara spesifik keluaran dari kegiatan ini adalah adanya program/kegiatan prioritas yang akan didanai APBD; program/kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai APBN melalui; (a) UKPPD lengkap (F3) yang akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Renja K/L, (b) kegiatan UKPPD terpilih yang akan menjadi prioritas pembahasan format F1 UKPPD untuk dibahas dalam Pra Musrenbangnas; rancangan RKP provinsi dan rancangan renja SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbangprov; dan kesepakatan usulan kegiatan dan kerangka isu strategis (maksimal 5 kegiatan).

Secara umum kegiatan Musrenbangprov sudah cukup baik, dan implementasinya menurut responden mencapai 86,72%.

(d) Pra Musrenbangnas

Pra Musrenbangnas adalah forum yang membahas sinkronisasi pusat daerah dan perwilayahan/hari. Secara keseluruhan keluaran Pra Musrenbangnas adalah hasil kesepakatan lokasi, target, dan anggaran antara pemerintah propinsi dan K/L yang disaksikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan; pada forum konsultasi publik, keluaran yang dihasilkan berupa isu-isu strategis hasil forum konsultasi publik yang telah dilakukan; dan untuk propinsi papu dan papu barat, keluaran yang dihasilkan berupa kesepakatan akhir terhadap lokasi, target, dan anggaran antara pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat dan

K/L dalam rancangan RKT-P4B tahun 2013 yang disaksikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dituangkan dalam bentuk acara kesepakatan. Secara umum hasil Responden mencapai 93,80% dan menilai pelaksanaan Pra Musrenbangnas sudah baik.

(e) Musrenbangnas

Musrenbangnas adalah tindaklanjut dari Pra Musrenbangnas yang pada hakekatnya berupa kegiatan penyampaian laporan hasil pramusrenbangnas, arahan presiden dan dialog Pusat daerah. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbangnas adalah laporan kesepakatan mengenai program, kegiatan strategis dan pendanaan pusat dan daerah kepada Presiden RI; Arahan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Paparan 3 (tiga) menteri Koordinator. Implementasi kegiatan Musrenbangnas menurut responden adalah 77,5%.

(f) Pasca Musrenbangnas

Pasca Musrenbangnas adalah pertemuan Bappenas-K/L untuk membahas hasil Musrenbangnas untuk penyempurnaan RKP 2013. Keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan ini adalah rancangan akhir RKP 2013 dan Rancangan akhir Renja K/L 2013. Secara umum kegiatan Pasca Musrenbangnas sudah baik, dan implementasinya menurut responden mencapai 83,33%.

Uraian diatas adalah beberapa pertimbangan oleh Pemerintah Daerah yang dinilai sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki masing-masing tahapan-tahapan pada rangkaian kegiatan dalam penyusunan RKP 2013. Secara umum usulan yang disampaikan pada proses musrenbangnas, mendapatkan respon cukup baik dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya perhatian yang diberikan pemerintah kepada daerah harus lebih besar. Efektifitas dan koordinasi di tingkat daerah sampai di tingkat nasional khususnya dalam perencanaan sudah baik. Namun koordinasi antar kementerian perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini selain Bappenas terdapat kementerian teknis yang langsung ke daerah dinas provinsi.

Dalam pelaksanaannya koridor penyampaian usulan kegiatan oleh daerah kepada pusat adalah sesuai dengan prioritas nasional, melalui forum rapat kordinasi, konsultasi/koordinasi dan penyampaian usulan secara langsung ke K/L, forum pertemuan triwulanan, Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, dan Musrenbangnas. Daerah umumnya melakukan *screening* terhadap usulan kegiatan yang diusulkan kepada pusat, adalah dengan melakukan perujukan prioritas program propinsi yang mengacu pada prioritas pusat. Disamping itu juga melalui rapat koordinasi, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi, penetapan skala prioritas, monev, forum SKPD dan mensinkronkannya dengan prioritas nasional dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan pusat.

2. Tujuan 2: Meningkatnya Peran Kementerian PPN/Bappenas Terkait Koordinasi Kebijakan Pembangunan Nasional Lainnya

Disamping pencapaian kinerja utama dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya dalam rangka efektivitas kerjasama pembangunan nasional maupun internasional. Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis dari tujuan kedua, diukur melalui seberapa banyak tugas-tugas lain sebagai penugasan pemerintah/Presiden yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dibandingkan dengan total tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah/Presiden. Dari target yang telah ditetapkan telah tercapai pelaksanaan seluruh penugasan yang diberikan oleh Pemerintah/Presiden sebesar 100% sebagaimana pada Tabel 7 di atas.

Adapun sejumlah penugasan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: (1) percepatan pencapaian MDGs (Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan), (2) penyusunan revisi Perpres dan RPerpres terkait pengadaan barang dan jasa, (3) pembangunan infrastruktur (Inpres No. 14/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional), dan (4) penyusunan kajian, kertas kebijakan dan evaluasi kebijakan.

a. Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan)

1) Percepatan Pencapaian Target MDGs

Koordinasi percepatan pencapaian target MDGs pada tahun 2012 terutama difokuskan pada penyusunan berbagai peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target MDGs, antara lain mencakup: (1) penyusunan Surat Edaran Kementerian PPN dan Kemendagri No. 0068/M.PPN/02/2012 dan No. 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) Tahun 2011-2015; (2) penyusunan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) MDGs Provinsi; (3) penyusunan pedoman teknis Reviu RAD MDGs Provinsi; (4) penyusunan kerangka kebijakan pendanaan percepatan sasaran MDGs melalui *Public Private Partnership* (PPP); (5) penyusunan pedoman harmonisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan CSR dengan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian MDG; (6) penyusunan pedoman pemberian insentif bagi daerah; (7) pelaksanaan diseminasi dan advokasi percepatan pencapaian MDGs kepada seluruh *stakeholders* meliputi DPR, K/L di tingkat Pusat, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa; (8) penguatan ketersediaan data dan informasi dengan kerjasama antara BPS; (9) penyusunan laporan MDGs Indonesia Tahun 2011; (10) penyusunan MDGs *Acceleration Framework* (MAF); (11) bersama-sama Kantor Utusan Khusus Presiden (KUKP) RI merumuskan kriteria penerima

MDGs Award; (12) pemantauan pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs Provinsi.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan pencapaian target MDGs pada tahun 2012 terutama pada bagaimana meningkatkan pencapaian target MDGs di tingkat nasional dan daerah, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi hasil pencapaian target MDGs di pusat dan daerah, dan bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber pendanaan di luar APBN yakni PPP dan CSR untuk mendukung pencapaian target MDGs.

2) Penyusunan RAN-PG dan RAD PG

Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat nasional (RAN-PG) dan daerah (RAD-PG) sebagaimana Inpres No. 3/2010 merupakan integrasi penanganan pangan dan gizi baik oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RAD-PG yang terpadu, terkoordinasi, sinergis, dan komprehensif serta bersifat lintassektor dan lintasprogram yang disusun bersama oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 0154/M.PPN/05/ 2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Hingga akhir tahun 2012, tercatat 32 Provinsi telah menetapkan dokumen RAD-PG melalui Peraturan Gubernur, Provinsi Papua Barat sampai saat ini masih melakukan proses penyusunan dokumen RAD-PG. Selain itu Kementerian PPN/Bappenas secara resmi telah melakukan launching dokumen RAD-PG tingkat provinsi dan diikuti dengan sosialisasi mekanisme pemantauan pelaksanaan RAD-PG tingkat provinsi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan RAD-PG adalah memastikan setiap kegiatan, indikator dan target yang dicantumkan dalam RAD-PG Provinsi diinternalisasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dialokasikan pembiayaannya pada dokumen anggaran SKPD provinsi, kabupaten, dan kota secara memadai. Selain itu, memastikan sinergisitas target pembangunan pangan dan gizi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten serta kota. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam dua tahun ke depan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator yang tercantum dalam RAD-PG secara terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan juga melakukan penguatan sosialisasi dan advokasi pada setiap jenjang.

b. Pengadaan Barang dan Jasa

1) Penyusunan Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mereviu dan melakukan penyempurnaan atas regulasi yang menghambat pelaksanaan APBN, Pemerintah cq. Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan LKPP telah mengambil langkah untuk merevisi Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan revisi adalah: (1) mempercepat proses pelaksanaan pengadaan; (2) penyederhanaan prosedur pengadaan; dan (3) menghilangkan multitafsir. Usulan revisi (R-Perpres Perubahan Perpres No. 54/2010) telah ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2012 menjadi Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Penyusunan Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Untuk mendukung dan mengakomodasi kebutuhan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan LKPP menyusun Perpres baru (disamping Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang berlaku khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai bentuk affirmative actions untuk orang asli Papua, yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dan untuk menciptakan perluasan lapangan kerja bagi penduduk asli Papua. Rperpres dimaksud telah ditetapkan menjadi Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 17 Oktober 2012.

c. Pembangunan Infrastruktur (Inpres No. 14/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional)

1) Penurunan Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat, Kereta Api, Laut, dan Udara

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Tingginya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan transportasi menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia dan stakeholder lainnya telah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035, yang sejalan dengan amanat UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203.

RUNK Jalan secara jangka panjang menetapkan target capaian, yakni menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebesar 80 persen pada tahun 2035 yang diukur berdasarkan tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan atau disebut indeks fatalitas per 10.000 kendaraan. RUNK Keselamatan Transportasi Jalan memuat Program dan Rencana Aksi: (1) Manajemen Keselamatan Jalan; (2) Jalan yang Berkeselamatan; (3) Kendaraan yang Berkeselamatan; (4) Pendidikan Keselamatan Jalan, dan (5) Perawatan Pascakecelakaan.

Implementasi dari RUNK 2011-2035 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas adalah menjadikan keselamatan jalan menjadi salah satu mainstreaming kebijakan pemerintah dan telah diinisiasi dalam RKP 2013 menjadi Fokus Prioritas baru.

2) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan KPS

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KPS dalam Penyediaan Infrastruktur. Beberapa hasil yang dicapai meliputi: (1) pemetaan konflik pengaturan KPS dengan beberapa peraturan perundang-undangan; dan (2) rekomendasi dan usulan tindak lanjut untuk mengatasi benturan Perpres No. 67/2005 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan yang terjadi dalam regulasi terkait dengan KPS antara lain, terdapat benturan antara Perpres No. 67/2005 dengan PP No. 6/2006, khususnya dalam hal: (1) kedudukan PP No. 6/2006 lebih tinggi dibanding Perpres No. 67/2005; (2) perbedaan pengaturan pihak yang berwenang menyelenggarakan pengadaan; (3) perbedaan pengaturan jumlah peserta tender; (4) perbedaan mengenai jenis kerjasama; dan (5) perbedaan jangka waktu kerjasama.

d. Penyusunan Kajian, Kertas Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan

- 1) Kajian Model Ekonomi Makro Kementerian PPN/Bappenas
- 2) Kajian Sistem Ekonomi Nasional
- 3) Kajian Penyusunan Indikator Daya Saing UMKM
- 4) Kajian Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Nasional
- 5) Kajian Konsep Pengembangan Moda Transportasi KA dan Angkutan Laut untuk Mengakomodasi Kendaraan dengan Beban 3 Sumbu (Axle)
- 6) Kajian Indeks Pembangunan Perdesaan
- 7) Kajian Pengembangan Sistem Evaluasi dalam Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
- 8) Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi di Indonesia: Perkeretaapian dan Pelabuhan
- 9) Kajian Penyusunan Panduan Evaluasi Tematis di Daerah
- 10) Kertas Kebijakan Menuju Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan SJSN yang Efektif, Efisien, Adil dan Berkelanjutan

- 11) Kertas Kebijakan Revitalisasi LPP Untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Informasi Indonesia
- 12) Prakarsa Strategis Pengembangan Industri Pertahanan Nasional
- 13) Evaluasi Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia
- 14) Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia

Sebagaimana Tabel 20 di bawah bahwa bila dibandingkan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah/Presiden antara tahun 2011 dengan tahun 2012 mengalami perbedaan jumlah penugasan. Namun penugasan tersebut ada yang merupakan penugasan kelanjutan ditahun 2012 dari tahun 2011. Tujuan penugasan tersebut adalah untuk mendukung koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Diharapkan penugasan lainnya oleh Pemerintah/Presiden di tahun mendatang akan tetap diselesaikan dengan baik oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas diposisikan untuk mensinergikan ego sektoral sehingga pencapaian tujuan pembangunan lebih terarah.

TABEL 20.
PERBANDINGAN JUMLAH PENUGASAN OLEH PEMERINTAH/PRESIDEN
TAHUN 2011 DAN 2012

TAHUN 2011	TAHUN 2012
Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan)	Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan) 1. Percepatan Pencapaian Target MDGs 2. Penyusunan RAN-PG dan RAD PG
Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Pengadaan Barang dan Jasa 1. Penyusunan Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Penyusunan Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GK)	Pembangunan Infrastruktur (Inpres No. 14/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional) 1. Penurunan Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat, Kereta Api, Laut, dan Udara 2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan KPS
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Jangka Menengah, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 tentang Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem untuk Mengamankan Produksi Beras	Penyusunan Kajian, Kertas Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan 1. Kajian Model Ekonomi Makro Kementerian PPN/Bappenas 2. Kajian Sistem Ekonomi Nasional 3. Kajian Penyusunan Indikator Daya Saing UMKM 4. Kajian Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Nasional 5. Kajian Konsep Pengembangan Moda Transportasi KA dan Angkutan Laut untuk Mengakomodasi Kendaraan dengan Beban 3 Sumbu (Axle) 6. Kajian Indeks Pembangunan Perdesaan 7. Kajian Pengembangan Sistem Evaluasi dalam Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja 8. Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi di Indonesia: Perkeretaapian dan Pelabuhan 9. Kajian Penyusunan Panduan Evaluasi Tematis di Daerah 10. Kertas Kebijakan Menuju Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan SJSN yang Efektif, Efisien, Adil dan Berkelanjutan 11. Kertas Kebijakan Revitalisasi LPP Untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Informasi Indonesia 12. Prakarsa Strategis Pengembangan Industri Pertahanan Nasional 13. Evaluasi Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia 14. Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia
Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	
Koordinasi Hibah Luar Negeri untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia	
Penyusunan <i>Good Governance Index</i>	

3. Tujuan 3 : Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas

Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas merupakan tujuan tambahan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 dengan sasaran strategis adalah terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2012 telah dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana Tabel 7.

Untuk mengukur keberhasilan peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, terdapat 5 (empat) ukuran indikator kinerja yang akan menunjukkan keberhasilan pendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, meliputi: 1) % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM; 2) % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas; 3) fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah; 4) Opini dari BPK atas Laporan Keuangan; dan 5) Standar penilaian *good governance*.

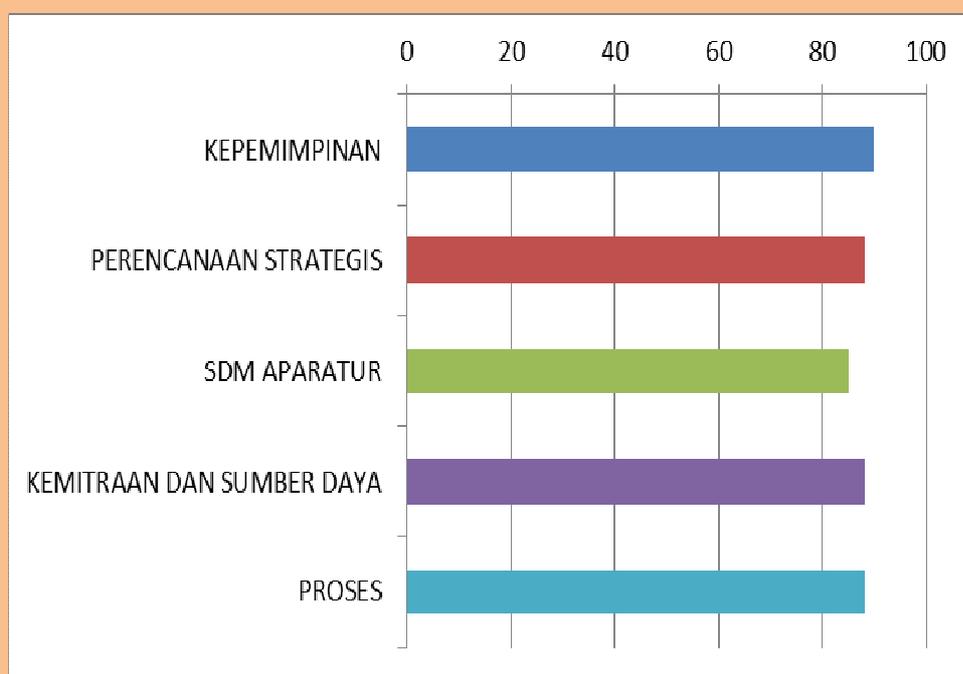
Sebagaimana Tabel 7 hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan ketiga Kementerian PPN/Bappenas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2012. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik sesuai dengan value "*Better Performance*" yang telah ditetapkan di Rencana Strategis. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan optimalisasi pengelolaan Sarana dan Prasarana. Untuk mengawal pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang dibawah koordinasi Inspektorat Utama.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas adalah dengan menggunakan Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai Pedoman Penilaian atas pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pengukuran dalam Metode tersebut menggunakan dua variable adalah 1) pengungkit dan 2) hasil. Pada awal tahun 2013 telah dilakukan penilaian menggunakan metode PMPRB. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim Assessor Kementerian PPN/Bappenas. ***Dari hasil penilaian tersebut dihasilkan penilaian sementara dengan perolehan nilai rata-rata 88,3 %.*** Hasil penilaian tiap komponen dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

GAMBAR 5.
PENILAIAN RB PADA KOMPONEN PENGUNGKIT
 (hasil sementara dari penilaian *assessor*)



Realisasi pencapaian pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas tersebut lebih rendah dari pada target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode penilaian yang semula dilaksanakan melalui *Quality Assurance* (2011) menjadi Penilaian Mandiri yang berpengaruh pada kriteria penilaian. Karena perkembangan inilah seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan kalibrasi ulang fokus pelaksanaan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang terdapat dalam PMPRB.

Meskipun tidak mudah melakukan perbandingan kuantitatif dengan tahun-tahun sebelumnya, secara kualitatif pelaksanaan RB di tahun 2012 banyak mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2011. Pelaksanaan RB dengan menggunakan PMPRB berdampak pada perbaikan yang mengutamakan perbaikan proses disamping perbaikan hasil. Dampak paling nyata yang dapat terlihat adalah meningkatnya keterlibatan pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan RB. Salah satu tolok ukur keberhasilan tersebut adalah animo pegawai dalam penyelenggaraan proses survey terhadap pegawai yang menjadi bukti keterlibatan aktif semua pihak. Disamping itu, pelaksanaan RB secara lembaga juga mendorong komunikasi yang lebih aktif antara pimpinan dan bawahan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pihak di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menghayati value *better performance* yang menjadi nilai organisasi.

Perbaikan tata laksana (*business proses*) dilakukan dengan mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap pelaksanaan tata laksana utama dan pendukung utama di Kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun 2012 ini dilakukan analisis

terhadap penyusunan RKP. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tata laksana pendukung utama seperti diantaranya adalah, evaluasi penggunaan layanan informasi gaji online, evaluasi penggunaan asset barang inventaris, pengembangan tata laksana pelayanan umum (ruang rapat dan layanan keluhan terhadap pengelolaan gedung), pengembangan layanan informasi dalam website, dan peningkatan layanan kehumasan dan kearsipan.

Berkaitan dengan penguatan tata nilai organisasi dan SDM, telah dilakukan perekrutan SDM secara terbuka, transparan dengan melibatkan penguji yang kompeten dari luar Kementerian PPN/Bappenas. Penempatan SDM dalam struktur jabatan struktural dan fungsional dilakukan melalui mekanisme *assessment* terhadap individu yang telah memenuhi syarat administratif. Penegakkan disiplin pegawai dilakukan melalui pemberlakuan sistem kehadiran menggunakan *finger scan* sejak tahun 2008.

Sementara itu, untuk pelayanan publik, salah satu bukti keberhasilan pencapaiannya adalah penerapan *e-government* yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan layanan kepada publik secara efisien, efektif dan lebih interaktif. Program *e-government* ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai perwakilan media publikasi. Disamping itu, pada tahun 2012 ini Kementerian PPN/Bappenas juga terus mempercepat reformasi birokrasi melalui mekanisme beasiswa untuk program pendidikan dan latihan untuk aparatur pemerintah pusat dan daerah. Sasaran alokasi beasiswa 90% diupayakan dapat menjangkau aparatur perencana pemerintah di berbagai daerah dengan titik berat Indonesia timur.

Pelaksanaan RB di tahun 2012 lebih dititikberatkan pada proses disamping pada hasil yang selama ini dilakukan. Kemajuan pelaksanaan pada tahun 2012 adalah meningkatnya komitmen pimpinan untuk pelaksanaan RB dengan dibahasnya monitoring pelaksanaan RB dalam Rapat Pimpinan yang dilakukan secara periodik. Peningkatan perhatian ini juga diikuti dengan semakin terarahnya pelaksanaan RB meskipun terdapat sedikit gangguan akibat perubahan mekanisme penilaian. Pelaksanaan RB juga diikuti dengan atensi yang cukup baik dari seluruh kalangan pegawai. Dengan demikian, kepedulian pegawai terhadap program Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas semakin meningkat.

Untuk mempertegas pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas, kedepannya akan dilakukan berbagai upaya percepatan program-program terkait pelaksanaan program RB sebagai bagian dari komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan akselerasi program Reformasi Birokrasi.

2) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mendukung tugas-tugas utama sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas perlu menyediakan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar pelayanan yang akan dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan khususnya dalam pemberian

pelayanan yang lebih baik sesuai dengan moto Kementerian PPN/Bappenas adalah *"better performance"* Saat ini dengan semakin bertambahnya volume pekerjaan maupun penambahan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan organisasi maka dirasakan kebutuhan akan sarana dan prasarana semakin dirasakan masih belum memadai. Untuk itu, kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang menjadi sangat prioritas dalam Renstra Periode 2010-2014. Salah satu yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adalah penyediaan fasilitas kantor berupa gedung yang memadai termasuk penyediaan dan pemeliharaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, serta sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara/BMN).

Sebagaimana Tabel 7 pencapaian hasil pengukuran atas indikator kinerja ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas telah **terrealisasi pencapaian sebesar 91,15% dari 100% yang ditargetkan**. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik internal maupun eksternal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan ukuran kinerja atas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas adalah dengan membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang dihasilkan sesuai standar dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan sesuai standar.

Pencapaian kinerja mengenai ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- (a) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional, mencakup antara lain: renovasi gedung dan ruang kerja, tersedianya buku-buku perpustakaan dan buku-buku yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas, buku-buku perpustakaan yang lebih terawat, tersedianya jaringan sistem informasi pengadaan perlengkapan sarana gedung, tersedianya meubelair, tersedianya alat pengolah data, pembangunan pagar kavling/asset Kementerian PPN/Bappenas di Jatisari dan Jatisampurna, serta kegiatan audit struktur gedung Kementerian PPN/Bappenas.
- (b) Peningkatan kualitas pendukung pelayanan umum dan operasional, mencakup antara lain: tersusunnya rencana kerja/kegiatan, tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa, laporan revidi atas rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terbitnya majalah Perencanaan Pembangunan, laporan hasil evaluasi penggunaan alat tulis kantor, laporan hasil evaluasi penggunaan ruang kantor dan area parkir, serta tersedianya alat tulis kantor.
- (c) Dalam upaya memfasilitasi Sistem Layanan Data dan Informasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2012 telah dilaksanakan: (1) penyempurnaan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan, seperti pembuatan *Dashboard* Data dan Informasi; (2) pengembangan perpustakaan dan kearsipan antara lain: (i) penambahan koleksi bahan pustaka, (ii) pembuatan pedoman tata kelola kearsipan dan jadwal retensi arsip; (3)

peningkatan prasarana teknologi informasi, seperti: (i) pembangunan *Disaster Recovery Center (DRC)* sebagai *backup* dan *recovery* data dan informasi yang berlokasi di Batam untuk menjaga keberlangsungan layanan teknologi informasi, (ii) peningkatan kapasitas koneksi internet dan intranet; (4) pengembangan sistem aplikasi, seperti: pembuatan platform jejaring kerja sebagai dasar pengembangan berkelanjutan untuk mewujudkan *virtual office*.

Realisasi pencapaian indikator kinerja tersebut tidak dapat memenuhi target dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembangunan gedung di jalan Proklamasi Nomor 70, Jakarta Pusat (gedung Pusbindiklatren). Tidak terlaksananya pembangunan gedung ini disebabkan karena terjadi kegagalan lelang sebanyak 2 (dua) kali. Namun, reviu terhadap *Detail Engineering Design (DED)* gedung tersebut masih tetap dilaksanakan, karena DED merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan gedung secara keseluruhan yang akan dibangun pada tahun 2013.

Sejak tahun 2006, Kementerian PPN/Bappenas sedang dan terus melakukan penataan manajemen Barang Milik Negara (BMN), pengorganisasian, penataan sistem dan prosedur, inventarisasi dan penerapan akuntansi BMN. Penghitungan awal akuntansi data seluruh aset BMN Kementerian PPN/Bappenas ke dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara berdasarkan saldo awal BMN pada tahun 2006 senilai Rp 109.099.192.458,00, dan sampai dengan semester I tahun 2012 nilai BMN Kementerian PPN/Bappenas di dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) meningkat menjadi Rp 538.665.184.624,00. Upaya untuk penataan manajemen BMN di Kementerian PPN/ Bappenas terus dilakukan sejak tahun 2006. Sebagai hasilnya, pada tahun 2011 Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Kementerian PPN/Bappenas berupa **“Peringkat Nomor Dua Terbaik Atas Pengelolaan BMN”**, dalam kelompok K/L yang mempunyai jumlah Satuan Kerja (Satker) antara 1 sampai 10 Satker.

GAMBAR 6.
PENGHARGAAN PENGELOLAAN BMN



Dengan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana aparatur di Kementerian PPN/Bappenas”, maka diharapkan: a) sarana dan prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan/ bermanfaat untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan lembaga; dan b) pengadaan dan pengelolaan BMN Bappenas dapat dilaksanakan lebih akuntabel.

3) Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, diperlukan pengembangan SDM aparatur perencana untuk mendukung tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas mendorong peningkatan kapasitas aparatur perencana baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur perencana agar dapat mendukung tugas-tugas perencanaan di masing-masing unit organisasi di tingkat pusat dan daerah agar dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur Perencana dilakukan melalui berbagai kegiatan yang intinya mendukung pencapaian kualitas pembinaan SDM Aparatur Perencana yaitu kegiatan mulai kegiatan seleksi peserta sampai dengan penempatan baik untuk program diklat gelar maupun non gelar, serta diklat penjenjangan perencana sesuai kompetensi untuk penjenjangan perencana.

Hasil pencapaian atas indikator kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur Pusat dan Daerah adalah sebesar 94,50%. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas dapat meningkatkan kompetensi standar aparatur perencana melalui berbagai program pelatihan baik jangka panjang maupun pendek untuk menghasilkan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun penjelasan ukuran kinerja atas kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah adalah berdasarkan perbandingan antara jumlah aparatur perencana yang ditingkatkan kompetensinya dengan jumlah aparatur perencana yang direncanakan pengembangan kompetensinya. Secara rinci ukuran capaian kinerja tersebut terdapat pada Tabel 21.

TABEL 21.
KINERJA PEMBINAAN SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2013

PROGRAM	RENCANA (orang)	REALISASI (orang)	%
1. Penempatan Diklat Gelar	670	621	92,7
• Dalam Negeri	447	419	93,7
• Linkage	165	139	84
• Luar Negeri	58	63	108,6
2. Penempatan Diklat non Gelar	1.247	1.429	114,5
• Dalam Negeri	1039	1196	115
• Linkage	50	75	150
• Luar Negeri	158	158	100
3. Pelaksanaan Kelulusan Kompetensi Penjenjangan Perencana	299	299	100
• JFP Pertama	179	179	100
• JFP Muda	60	60	100
• JFP Madya	55	55	100
• JFP Utama	5	5	100
4. Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Perencana	420	299	71,2
• JFP Pertama	250	179	71,6
• JFP Muda	100	60	60,0
• JFP Madya	60	55	91,2
• JFP Utama	10	5	50,0
JUMLAH			94,6

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana di tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan kapasitas melalui diklat jangka panjang (diklat gelar S2/S3), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada tahun 2012 berhasil menjaring 621 orang calon peserta diklat gelar, dari target sebanyak 670 orang. Sedangkan untuk diklat non gelar terdapat peserta sebanyak 2.017, (terdiri atas 1.718 orang *substantive*, 299 orang diklat PFP). Selain diklat gelar dan non gelar, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah melalui diklat Fungsional Perencana dengan melibatkan aparatur sebanyak 299 orang dari target sebanyak 420 orang. Untuk memperkuat kualitas Tim Penilai, telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Ahli bagi Fungsional Perencana Nasional melalui pelatihan dan *workshop* kepada 77 orang.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2010 dan 2011 terlihat bahwa capaian kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah terus meningkat sebagaimana terdapat pada Tabel 22.

TABEL 22.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DIKLAT SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH

PROGRAM DIKLAT PERENCANA	CAPAIAN KINERJA (%)		
	2010	2011	2012
1. Penempatan Diklat Gelar	83,0	90,0	92,7
2. Penempatan Diklat non Gelar	100	100	114,5
3. Pelaksanaan Kelulusan Kompetensi Penjenjangan Perencana	100	100	100,0
4. Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Perencana	87,0	88,0	71,2
TOTAL KEBERHASILAN	92,5	94,5	94,6

Terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah, Bappenas sebagai penyedia dan pengelola beasiswa diklat perencanaan, telah bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri ternama baik di dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2012, program diklat melibatkan 11 perguruan tinggi pada 18 program studi pelaksana gelar dan diklat non-gelar yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta tujuh program studi *linkage* Jepang dan enam program studi *linkage* Belanda. Adapun Program Studi penyelenggara diklat gelar yang ada di 11 perguruan tinggi di dalam negeri, yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Hasanudin. Sedangkan untuk program S2 *linkage* Jepang, terdapat enam program studi yang berada di 5 perguruan tinggi di Indonesia (ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Brawijaya bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi di Jepang (Ritsumeikan University, Kobe University, Keio University, Miyazaki University, Yamaguchi University, Hiroshima University, GRIPS, Takushoku University, IUJ, Tohoku University).

Untuk program S2 *Linkage* Belanda, 6 universitas di Indonesia (ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, bekerjasama dengan 6 universitas di Belanda (Rijksuniversiteit Groningen, Vrije University, Tilburg University, IHS Belanda, ITC Enschede, IHE, Twente University). Sedangkan dalam kegiatan kajian Kedudukan dan Mekanisme Kerja JFP di Instansi Perencanaan Pusat dan Daerah, Pusbindiklatren bekerjasama dengan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I).

4) Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas adalah adanya opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012 merupakan capaian kinerja tahun 2012. Prestasi ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP selama 4 (empat) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas sebagai Koordinator penyusunan laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. ***Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 untuk tahun periksa tahun 2011.***

Disamping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan revidu secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Inspektorat atas penyiapan laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

GAMBAR 7. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan merupakan salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Ibu Menteri dengan Bapak Presiden pada awal tugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pencapaian opini WTP juga merupakan isu yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dari akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus menerus dan berlanjut dilakukan sampai dengan saat ini, tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Identifikasi titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan keuangan "WTP"
- (b) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- (c) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan
- (d) Pelaksanaan *Quality Assurance*
- (e) Pendampingan atas pemeriksaan BPK

5) Standar Penilaian *Good Governance*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* yang lebih berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas melakukan program pengawasan yang berorientasi pada nilai tambah. Program pengawasan tersebut dilaksanakan dalam dua besaran kegiatan yaitu kegiatan *assurance* dan kegiatan konsultasi.

Kegiatan *assurance* difokuskan pada signifikansi dampak produk atau pelaksanaan tugas dan fungsi bagi institusi. Disamping itu, dilakukan proses reviu atas laporan keuangan, dan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi kewajiban instansi dalam menjaga akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan.

Ruang lingkup kegiatan konsultasi meliputi edukasi, fasilitasi dan pemberian nasehat (*advisory*). Dalam kerangka ini, telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: (1) penugasan *liaison officer* (LO) untuk mengawal PPK dan unit kerja dalam mengelola anggaran, dan LO melakukan pendampingan dan pemantauan penyerapan anggaran dan pendampingan dalam pelaksanaan audit oleh pihak eksternal (BPK/BPKP); (2) diagnosis *assessment* terhadap manajemen dalam rangka mengidentifikasi risiko di level strategis, dan menyusun rencana aksi untuk memitigasi risiko sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diamanatkan dalam PP No. 60/2008; (3) pemetaan tata laksana penyusunan RKP 2013 untuk menemukenali pemangku kepentingan dan mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam penyusunan RKP tersebut; (4) pemberian PPK *award* kepada PPK terbaik dalam rangka memberi apresiasi dan membangun *role model* terkait bidang manajemen pelaksanaan anggaran; dan (5) telah dicanangkannya Zona Integritas sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam upaya mencegah praktek korupsi.

Terkait dengan pelaksanaan RB, APIP sebagai koordinator asesor telah mengupayakan terselenggaranya pemahaman terhadap metode penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sesuai Permen PAN-RB No. 1/2012. Selain itu, APIP berperan aktif dalam menggulirkan upaya perubahan manajemen untuk mencapai target RB Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan internal, APIP telah berinisiatif dilakukan audit kinerja dan penilaian kapabilitas internal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rencana program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur pada tahun 2013 dan tahun 2014 akan berfokus pada upaya untuk menjaga tingkat akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dengan melakukan beberapa strategi implementasi sebagai berikut: (1) menjaga keselarasan indikator dalam pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan yang bersifat *preventive*; (2) menyusun peraturan operasional *whistle blowing system*, tata cara penyampaian laporan gratifikasi internal, dan peraturan lain terkait pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan; (3) melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal

untuk membangun sinergi pengawasan yang efektif; dan (4) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia APIP dalam melaksanakan pengawasan.

Semakin membaiknya standar penilaian tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) merupakan salah satu indikator keberhasilan dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Pengukuran indikator tersebut diperoleh dari penjabaran sasaran strategis di Unit Eselon I Inspektorat Utama. Sejalan dengan hal tersebut, maka standar penilaian tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) sebagai salah satu indikator keberhasilan dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dapat dikatakan tercapai secara baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

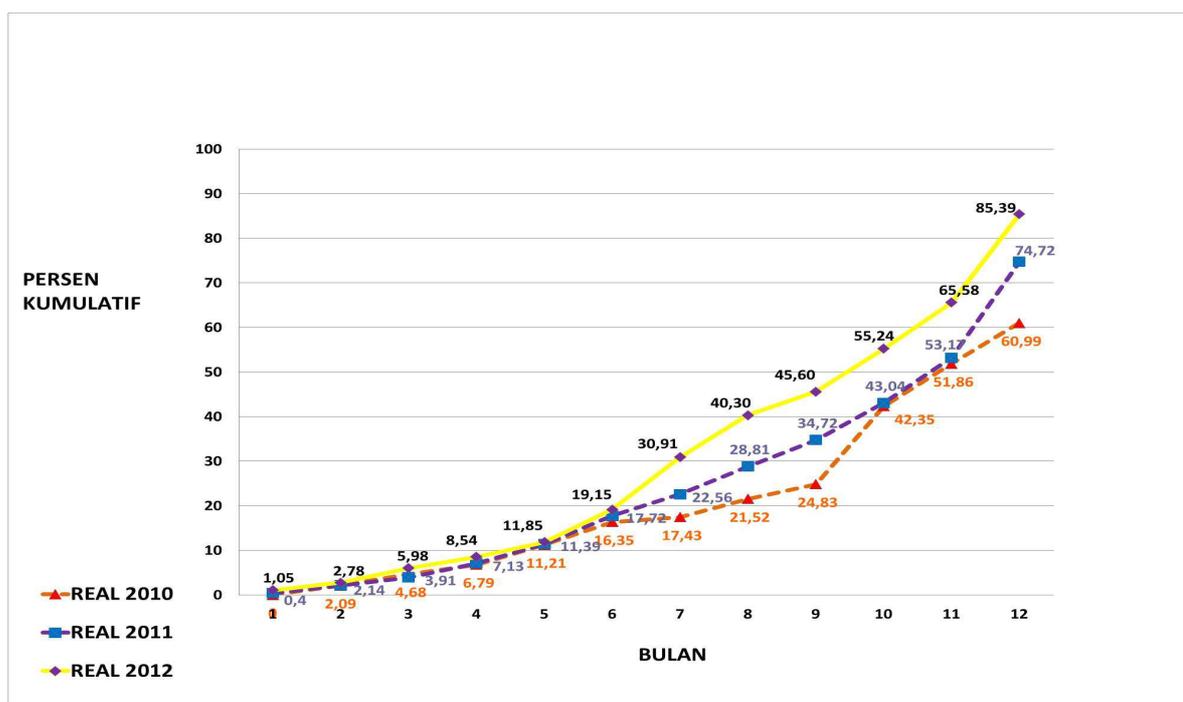
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2012 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 741,671 miliar yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 446,251 miliar (60,17%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 295,420 (39,83%). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 633,331 miliar (85,39%) yang terdiri dari dana rupiah murni sebesar Rp. 380,873 miliar (85,35%), dan dana PHLN sebesar Rp. 252,457 miliar (85,46%), seperti yang terlihat pada Tabel 23 dan Tabel 24. Sedangkan permasalahan dihadapi dalam realisasi penyerapan anggaran tahun 2012 sebagaimana terdapat pada Tabel 25.

Namun demikian realisasi penyerapan anggaran tahun 2012 sebesar 85,39% lebih tinggi bila dibandingkan persentase realisasi anggaran pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terdapat pada Gambar 8.

TABEL 23.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2012

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	119.773.502.000	113.243.195.000	233.016.697.000	114.485.033.130	95,58	97.810.859.877	86,37	212.295.893.007	91,11
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	264.278.298.200	182.176.827.000	446.455.125.200	225.939.879.779	85,49	154.646.940.249	84,89	380.586.820.028	85,25
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	58.500.000.000	-	58.500.000.000	36.916.562.851	63,11	-	-	36.916.562.851	63,11
IV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BAPPENAS	3.700.000.000	-	3.700.000.000	3.532.305.424	95,47	-	-	3.532.305.424	95,47
JUMLAH		446.251.800.200	295.420.022.000	741.671.822.200	380.873.781.184	85,35	252.457.800.126	85,46	633.331.581.310	85,39

GAMBAR 8.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2010, 2011 DAN 2012



TABEL 24.
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
	ALOKASI	REALISASI	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	223.796.043.000	212.295.893.007	<p>Rencana prioritas pembangunan nasional di berbagai bidang dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggaran, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional (3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan (4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional (5) Kajian kebijakan di berbagai bidang perencanaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	466.455.125.200	380.586.820.028	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dukungan rangkaian kegiatan penyusunan RKP dan Musrenbangnas (2) Hasil pelaksanaan Koordinasi strategis Konektivitas Nasional, MP3EI, Kesejahteraan sosial, Perubahan iklim dan lingkungan hidup, Pengembangan dunia usaha, Pengembangan Kerjasama Pembangunan G-20 dan Selatan-Selatan, serta Tata kelola pemerintahan yang baik. (3) Penguatan fungsi perencanaan pusat dan daerah melalui peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. (4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga, peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, serta penyempurnaan ketatalaksanaan. (5) Pelaksanaan kegiatan pendukung dan teknis lainnya.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	58.500.000.000	36.916.562.851	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung (2) Pengadaan alat pengolah data dan sistem informasi (3) Pengadaan/penggantian kendaraan dinas (4) Renovasi ruang kerja dan rapat
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	3.700.000.000	3.532.305.424	<ol style="list-style-type: none"> (1) Hasil pengawasan dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui Pemeriksaan, <i>Review</i>, Evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kinerja serta melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari pemeriksa eksternal dan internal. (2) Peningkatan peran konsultasi dengan melibatkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Liason Officer</i> kepada unit kerja dalam rangka penerapan SPIP

TABEL 25.
MATRIK PERMASALAHAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012

ANGGARAN	PERMASALAHAN
<p>Alokasi Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2012 sebesar Rp. 741,6 M</p> <p>1) Rupiah murni sebesar Rp. 446,2 M</p> <p>2) PHLN sebesar Rp. 295,4 M</p>	<p>Penyerapan anggaran Rupiah Murni (RM) dan PHLN adalah sebesar Rp. 633,3 miliar dipengaruhi oleh antara lain:</p> <p>a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya khususnya pada Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, yaitu :</p> <p>1. Program Degree</p> <p>Jumlah peserta tidak memenuhi target dikarenakan banyak peserta yang tidak memenuhi kualifikasi.</p> <p>2. Program non Degree</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak usulan non gelar dari instansi yang tidak sesuai Human Capital Development Plan (HCDP) • Usulan non gelar dari instansi melebihi pagu dalam Project Operating Manual (POM) <p>b. Penyerapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sangat rendah, pada awalnya dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (lelang ulang), seperti pekerjaan pembangunan gedung Proklamasi. Namun pekerjaan pembangunan gedung Proklamasi tersebut dibatalkan karena para peserta lelang yang berjumlah 34 tidak memenuhi persyaratan diantaranya persyaratan administrasi dan persyaratan metodologi (penundaan pembangunan).</p>

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2012 yang dilaksanakan dari masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada Tabel 23 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2012 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 233.016.697.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 119.773.502.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 113.243.195.000,-. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 212.295.893.007,- (91,11%) yang terdiri dari RM sebesar Rp. 114.485.033.130,- (95,58%), dan dana PHLN sebesar Rp. 97.810.859.877,- (86,37%)

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini dikelola oleh 12 (dua belas) PPK yang berada di UKE I (Kedeputan) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kedeputan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini, pencapaian target indikator kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan RPJMN 2010-2014, dan RKP 2013, serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2012 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 446.455.125.200,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 264.278.298.200,- dan dana PHLN sebesar Rp. 182.176.827.000,-, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan, serta sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Kementerian PPN/Settama Bappenas dan mencapai realisasi sebesar Rp. 380.586.820.028,- (85,25%) yang terdiri dana RM sebesar Rp. 225.939.879.779,- (85,49%), dan dana PHLN sebesar Rp. 154.646.940.249,- (84,49%). Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam program ini, pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2012 yang sesuai dengan sasaran strategis telah ditetapkan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sarana sistem

informasi perencanaan pembangunan nasional, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara).

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 36.916.562.851,- (63,11%). Penyerapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sangat rendah, pada awalnya dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (lelang ulang), seperti pekerjaan pembangunan gedung Proklamasi. Namun pekerjaan pembangunan gedung Proklamasi tersebut dibatalkan karena para peserta lelang yang berjumlah 34 tidak memenuhi persyaratan diantaranya persyaratan administrasi dan persyaratan metodologi (penundaan pembangunan).

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2012 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.700.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 3.532.305.424,- (95,47%). Pencapaian realisasi anggaran pada program ini tertinggi dibandingkan dengan program lainnya.

Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan UKE II di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Administrasi Umum adalah: (a) Penyusunan SOP Audit; (b) Peningkatan Kompetensi Profesi Auditor secara berkelanjutan; (c) Monitoring Pengawasan Anggaran; (d) Koordinasi Strategis Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan; (e) Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (f) Pemeriksaan / Audit; dan (g) Kegiatan Penyusunan UPKPT, Reviu TOR dan RAB dan Laporan Keuangan.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan adalah: (a) Kegiatan Koordinasi Kinerja Kelembagaan; (b) Kegiatan Pengawasan Manajemen Kinerja Kelembagaan; (c) Kegiatan Monitoring Kinerja Kelembagaan; (d) Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan; (e) Pemetaan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan; dan (f) Pengawasan Kinerja Program / Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2012 telah terealisasi pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh realisasi yang dicapai dari target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel hasil pengukuran kinerja di atas. Atas tercapainya hasil kinerja Tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang.

Namun hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa-masa mendatang agar peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas benar menunjukkan sebuah lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
- 3) Kementerian PPN/Bappenas terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan *Roadmap* yang telah disusun.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.